

BERANDA SEJARAH

Media Informasi dan Komunikasi

WAWANCARA
"Hilmar Farid
dan
Direktorat Sejarah"



Sumber: Peta Pulau Banda dari Koleksi Arsip BPNP Ambon

Beranda Sejarah | No. 01 Desember 2017

LAPORAN UTAMA:

ekspedisi
jalur rempah
2017

Salam Redaksi

Pembina

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Pengarah

Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Pemimpin Umum

Edy Suwardi
Kepala Subdit Internalisasi Nilai Sejarah

Redaktur Pelaksana

Herliswanny
Muhammad Iqbal
Dian Andika Winda
Ratih Widyastuti
Tita Chairunnisa

Staf Redaksi

Dian Andika Winda
Purnawan Andra

Redaktur Khusus

Kasijanto Sastrodinomo

Editor

Shalfiyanti

Koresponden

Ratih Widyastuti

Desain Visual

Fariz Rizqi Muhammad

Sekretariat

Zakiah Egar Imani
Tita Chairunnisa

Distribusi/Sirkulasi

Ganda Nainggolan, Samino K

Penerbit

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Alamat

Direktorat Sejarah, Kompleks Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E,
Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta 10270;
Telpon: 021 – 5725540 ext 13;
E-mail: internalisasi.sejarah@gmail.com



905
BER

Indonesia adalah sebuah gambaran statistik keragaman yang luar biasa impresif terdiri dari beribu pulau tersebar di sepanjang kepulauan terbesar dunia sepanjang 3200 mil membentang melintasi garis khatulistiwa serta dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk, yang terdiri lebih dari 300 kelompok etnik dan beragam agama, ras dan kelompok sosial.

Letak geografisnya ini menjadikannya sebagai negara topis (dan kepulauan, bahari, maritim) dengan berbagai konsekuensi antropologis kehidupan penduduknya. Teknologi pelayaran dan perkapalan yang berkembang di kepulauan ini, sudah tercatat sejak 5000 SM, dan sejak 1000 SM merajai bahkan menjadi andalan berbagai bangsa dunia untuk ekspedisi lautnya.

Masyarakat Nusantara diikat oleh satu kesatuan primordialisme budaya yang disebarkan atau dirangkai-jahitkan oleh para pelayar Nusantara yang terdiri dari kaum pedagang, penyebar agama, pendekar bangsawan pengembara. Kaum Eropa menyebutnya sebagai “bajak laut” sehingga kini masuk kosakata bahasa Inggris sebagai “The Bogey” atau “Bogeyman” yang berarti “hantu laut atau bajak laut” yang mengacu kepada suku-bangsa “Bugis” (Daery, 2011) Peran para pedagang-pelayar-penyebar agama-bangsawan pendekar pengembara itu, membuat Nusantara yang terpisah satu dari lainnya karena laut yang membentang, menjadi “kesatuan budaya” dalam “nilai-nilai modernitas” yang tak ada jarak.

Adrian Vickers (2009) membuktikannya dengan simbol-simbol perahu di kain tenun tapis Lampung dengan lukisan “tradisional” Bali, yang sama dan senada menggambarkan migrasi kelautan. Simbolisme kapal dalam kebudayaan kita, lazimnya dalam bentuk peti mati atau sarkofagus, memang digunakan di berbagai daerah Indonesia (seperti Marapu, Lombok dan Bali) untuk mempresentasikan perjalanan jiwa, gerak menempuh babak-babak kehidupan.

Dinamika masyarakat maritim Nusantara ini tentu saja membawa dan mengembangkan juga kultur yang pluralistik, terbuka, egaliter dan kosmopolit. Dalam catatan, sejarah negeri ini memang berawal dari kerajaan yang berada di dekat laut dan memiliki bandar. Begitu menariknya kehidupan di pantai, hingga Vickers menyebutnya sebagai sebuah entitas yang menyediakan wawasan tentang peradaban khas Asia Tenggara. Hal ini terwujud dalam teknologi, cara pikir, pola perilaku, hingga sistem-sistem kepercayaan dan bermasyarakat yang diterapkannya (hukum, ekonomi, politik dan diplomasi). Terdapat mata rantai perdagangan, pertukaran intelektual, pergerakan manusia, pergerakan motif-motif dan bentuk-bentuk kesusastaraan dan kesenian yang menyediakan wawasan tentang peradaban khas Asia Tenggara.

Artikel-artikel dalam media ini menjadi salah satu hasil verifikasi folklor, produk kultural di sepanjang jalur pelayaran Nusantara. Penjelajahan atas ruang-ruang produksi kebudayaan di zona jalur kebudayaan semacam ini penting untuk mendapatkan pengetahuan lokal masyarakat dengan mengidentifikasi produk-produk dan rute-rute persebaran kebudayaan dan nilai-nilai budayanya.

Konsep pemikiran kajian di sepanjang jalur kebudayaan Nusantara tak hanya romantisme imaji dan narasi, namun basis logika yang membuka ruang pemaknaan, tapi juga dapat digunakan sebagai ikon diplomasi budaya untuk menyebarluaskan nilai-nilai peradaban bangsa di dunia internasional.

Oleh karenanya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan majalah ini. Sebagai sebuah langkah kecil dalam usaha positif sebagai bagian dari pembangunan karakter dalam konteks pembangunan budaya bangsa, tentu saja hal ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran membangun selalu kami tunggu demi perbaikan pada edisi-edisi mendatang. Harapan kami semoga majalah ini menjadi salah satu referensi yang senantiasa dinanti kehadirannya. ●

Selamat membaca.



Daftar Isi

Beranda Sejarah | No. 01 Desember 2017 |

| | | | |
|--|----|--|----|
| Salam Redaksi | 1 | • Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Ekspedisi Batik | 46 |
| Pesan Direktur | 3 | • Persemaian Nilai Budaya | 48 |
| KIPRAH : | | | |
| • Ekspedisi Jalur Rempah 2017..... | 4 | UNTAI : | |
| • Kemah Budaya | 8 | • Malapetaka Malnutrisi di Jakarta | 56 |
| • Lawatan Sejarah Nasional 2017..... | 12 | • Sumber Sejarah Indonesia di Jepang | 60 |
| • Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah..... | 18 | BINGKAI : | |
| • Sistem Informasi Geografis Kesejarahan..... | 22 | • Foto Kegiatan | 68 |
| • Mencetak Tenaga Kebudayaan yang Terampil dan Berkarakter..... | 28 | PUSTAKA : | |
| • Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Kesejarahan Tahun 2017..... | 34 | • Buku Terbitan Subdit Sejarah untuk SD-SMA | 70 |
| • Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejarahan Bagi Penulis Sejarah | 36 | WAJAH : | |
| • Kegiatan Internalisasi Nilai Kebangsaan di Wilayah Perbatasan | 42 | • Hilmar Farid dan Direktorat Sejarah | 72 |
| | | KHAZANAH : | |
| | | • Lada dalam Catatan William Marsden | 76 |



Pesan Direktur

Saat ini kita berada dalam budaya global, suatu era yang ditandai munculnya budaya media menjadi utama. Media menjadi cara untuk melihat dan menginformasikan kenyataan di dunia, sebagai representasi sekaligus mempunyai kemampuan membuka persepsi baru tentang dunia sehingga membuat transformasi pengetahuan menjadi lebih mudah dipelajari. Sebagai produk kultural, ia bersifat sarat informasi yang benar dan memperkaya wawasan.

Beranda Sejarah merupakan majalah terbitan Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi corong informatif pengusung visi dan misi direktorat, sekaligus menginformasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Sejarah. Hal ini dilakukan dalam konteks penyebarluasan implementasi visi dan misi instansi. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat pembacanya, dengan mengangkat tema-tema khusus di setiap terbitannya.

Kali ini Beranda mengambil tema “Jalur Rempah”. Tema ini dipilih berdasar kenyataan sejarah posisi strategis Indonesia diantara dua benua dan dua samudra membuatnya menjadi titik penting dalam jalur perdagangan internasional sebagai jalur pelayaran rempah-rempah (*maritime spice route*).

Pergaulan ekonomi ini tidak hanya berhasil mendistribusikan komoditi perdagangan, teknologi, hingga sistem-sistem kepercayaan dan bermasyarakat yang diterapkannya (hukum, ekonomi, politik dan diplomasi), tapi juga bahasa, seni, dan tradisi lainnya. Dahana (2010) menyebut kemampuan masyarakat maritim itu tidak hanya berhasil mendistribusikan bahasa, teknologi, seni, dan tradisi lainnya hingga ke separuh dunia, bahkan telah menciptakan globalisasi untuk pertama kalinya di bumi ini.

Akhirnya Beranda sebagai media informasi Direktorat Sejarah diharapkan bisa mengembangkan nilai lama menjadi lebih adaptif terhadap kebaruan yang positif, produktif dan melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal, dengan tetap mempertimbangkan fenomena produk kebudayaan lain yang mengandung dimensi kesejarahan. Beranda diharapkan bisa mendorong penemuan identitas bangsa yang sejati dan adaptif terhadap laju jaman, mengembangkan dan memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan.

Direktur Direktorat Sejarah

Triana Wulandari

Kiprah

Ekspedisi Jalur Rempah 2017

Simpul Budaya Maritim dan Budaya Agraris

“Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut yang ditaburi pulau-pulau”

(A.B lapian)

Kepulauan Indonesia yang secara geografis terletak dalam jalur angin musim (muson) merupakan wilayah yang strategis dan ramai sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan dunia barat dan timur sejak milenium pertama masehi. Sebagai jalur pelayaran dunia, pulau-pulau di Nusantara menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai penjuru yang tidak hanya sebagai pelabuhan transit,

namun juga digairahkan oleh rempah-rempah yang tumbuh subur di kepulauan Indonesia.

Ramainya rempah dan pelayaran di kepulauan Indonesia, setidaknya tercatat dalam berita Tiongkok sejak awal masehi. Dinasti-dinasti kekaisaran Tiongkok, Masa Dinasti Tang, Dinasti Sung, Dinasti Yuan, Dinasti Ming (Abad 7-13 Masehi) telah menjalin hubungan dengan



Kiprah



Sampai dengan abad ke 16 dapat dikatakan rempah-rempah baru mulai menjalankan peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah Indonesia. Rempah-rempah memang diperdagangkan oleh beberapa kerajaan dan kekuatan politik lokal, namun perdagangan itu tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam dinamika masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan menentukan setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yang semula untuk mencari daerah produksi rempah-rempah, dalam perkembangannya, bangsa Eropa tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan, tetapi juga melakukan kolonisasi dan bahkan membangun kekuatan politik. Kepentingan awal mereka yang tadinya hanya untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah berkembang menjadi kepentingan ekonomi kolonial melakukan eksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan negeri induk.

Rempah dan kolonialisme bangsa Eropa membawa kisah yang suram selama berabad-abad, namun dibalik kisah suram juga membawa kekuatan terintegrasi suku-suku bangsa dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rempah dalam sejarah Indonesia bukan sekedar perdagangan komoditi, namun juga menjadi kekuatan yang menyatukan Indonesia antar satu

daerah dengan daerah lainnya, antar suku bangsa, antar nilai-nilai dan budaya, yang pada akhirnya membentuk identitas masyarakat Indonesia.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran tentang kejayaan maritim nusantara dan sebagai sumber rempah dunia, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah tahun 2017 di Provinsi Maluku. Ekspedisi Jalur Rempah adalah suatu kegiatan perjalanan untuk mengobservasi dan meneliti tempat-tempat yang merupakan bagian dari simpul-simpul sejarah maritim yang membentuk jaringan pelayaran Nusantara. **“Sejarah Jalur Rempah: Simpul Budaya Maritim dan Budaya Agraris”** merupakan tema yang diusung pada kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa dari seluruh Indonesia ini. Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah dilakukan guna mengingatkan kembali keterkaitan antara kekayaan sumberdaya agraris yang dimiliki Indonesia dengan kejayaan maritimnya melalui pelayaran dan perdagangan rempah di dunia.

Adapun ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 9-22 Oktober 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan ke lima wilayah yaitu Negeri

Luhu (Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat), Negeri Haruku (Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah), Negeri Tiouw (Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah), Negeri Abubu (Kecamatan Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah), dan Negeri Lonthoir (Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah) pada tanggal 10-16 Oktober 2017

2. Pengolahan data lapangan pada tanggal 17-19 Oktober 2017
3. Ekspose hasil observasi pada tanggal 20-21 Oktober 2017

Selama melakukan observasi lapangan di lima wilayah, para peserta melakukan aktivitas wawancara dengan penduduk setempat, dialog dengan tokoh lokal, serta pendokumentasian audio/visual. Selain itu para mahasiswa juga melakukan bakti sosial dengan membangun taman bacaan guna mendukung Gerakan Literasi yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Karya tulis yang dihasilkan kelompok peserta berdasarkan wilayah observasinya adalah sebagai berikut:

1. Kota Tua: Romantisasi Memori Pala Banda Sang Aroma Surgawi
2. Haruku: Keharmonisan Di Negeri Cengkeh
3. Potret Nusa Laut: Dulu, Kini Dan Nanti
4. Sapanorua: Pulau Dua Buah Sampan, Pulau Harapan Masa Depan

5. Jejak Rempah Dan Arus Budaya Negeri Luhu, Huamual

Selain karya tulis berupa makalah, para peserta juga menghasilkan karya berupa foto-foto dan film pendek yang berisikan tentang sejarah wilayah dan rempah di tiap-tiap wilayah observasi. Adapun karya film pendek tersebut adalah:

1. Sepotong Surga dari Banda (Kelompok Pulau Banda)
2. Berjalan di Haruku
3. Air dari Nusa Hulawano
4. The Documentary of Saparua
5. De Luhu Dahulu

Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah tahun 2017 melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Universitas Pattimura, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, Balai Arkeologi Ambon, Pemerintah Daerah setempat, dan tokoh masyarakat di wilayah observasi.

Kegiatan Ekspedisi Jalur Rempah 2017 merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan ekspedisi jalur rempah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Direktorat Sejarah. Untuk tahun 2018, Ekspedisi Jalur Rempah direncanakan akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk membangkitkan memori kolektif bangsa tentang kejayaan rempah Nusantara di masa lampau dan untuk merajut kembali pembangunan pemajuan kebudayaan.

Sampai jumpa di Maluku Utara ●



Kemah Budaya

Kemah Budaya Nasional 2017: Berwawasan Budaya Lokal

“Gerakan Pramuka harus menyiapkan diri menjadi generasi muda yang produktif, optimis, memiliki daya juang yang tinggi, serta pantang menyerah. Namun, tetap menjadi anak muda yang mencintai sesama, rela menolong, menjaga sopan santun serta budi pekerti.”

(Prof. Dr. Muhadjir Effendy)

Kehidupan berbudaya merupakan salah satu bentuk kehidupan yang sudah turun temurun dilakukan para pendahulu kita. Beraneka ragamnya kebudayaan di tanah

air kita, menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki jangkauan cukup luas, dengan keragaman dan keunikan di setiap wilayah berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa kebudayaan kita merupakan aset yang sangat penting





dan memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya karena itulah, keanekaragaman budaya itu perlu dilestarikan dan dikembangkan agar tidak mengalami kepunahan.

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan kebudayaan ini adalah terbuka lebarnya informasi tentang budaya modern, yang sangat bertentangan dengan sendi-sendi adat kebudayaan kita karena derasnya arus informasi tersebut, salah satu konsekuensinya dapat dirasakan pada jenis produk hiburan dan makanan, yang sarat dengan nilai-nilai budaya barat dan sangat mudah didapatkan. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan generasi muda kita dapat berpaling dan meninggalkan budaya aslinya. Apabila kondisi semacam ini tidak diantisipasi secara cepat dan tepat, boleh jadi ia dapat berpengaruh kepada memudarnya identitas dan jatidiri bangsa, yang selama ini dikenal sebagai bangsa berbudaya dan santun.

Mengingat dalam struktur pendidikan formal, dalam hal ini kurikulum pengajaran di sekolah tidak memuat secara jelas tentang materi kebudayaan, maka perlu dicari institusi lain yang dapat dijadikan sebagai wadah transformasi pengetahuan dan pemahaman kebudayaan kepada siswa dan generasi muda. Salah satunya adalah institusi kepramukaan yang merupakan salah satu bentuk struktur pendidikan di luar sekolah. Wadah ini dapat dijadikan sebagai media transformasi informasi budaya yang cukup memadai, mengingat wadah kepramukaan memiliki anggota yang berasal dari kalangan anak-anak hingga dewasa.

Perkemahan Budaya adalah suatu kegiatan budaya yang ditujukan bagi generasi muda, khususnya kalangan

Pramuka. Generasi muda di kalangan Pramuka ini, sangat perlu dibekali informasi dan pengalaman dalam hal keanekaragaman budaya Nusantara, mengingat peran penting mereka sebagai pelaku dan pengembang budaya.

Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, menyelenggarakan kegiatan Kemah Budaya Nasional. Kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012. Kemah Budaya pada tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; tahun 2013 dilaksanakan di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; tahun 2014 dilaksanakan di Solo, Provinsi Jawa Tengah; tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau; tahun 2016 dilaksanakan di Belitung, Provinsi Bangka Belitung; dan tahun 2017 ini dilaksanakan di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 16 s.d. 22 Juli 2017.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, bertindak sebagai Pembina Upacara dalam Upacara Pembukaan Kemah Budaya Nasional tahun 2017. Mendikbud memberikan pesan-pesan kepada para peserta Kemah Budaya Nasional yaitu agar generasi muda khususnya anggota Gerakan Pramuka harus menyiapkan diri menjadi generasi muda yang produktif, optimis, memiliki daya juang yang tinggi, serta pantang menyerah. Namun, tetap menjadi anak muda yang mencintai sesama, rela menolong, menjaga sopan santun serta budi pekerti.

Kiprah

Dalam acara pembukaan KBN Tahun 2017, tampil 1000 orang penari kecapi untuk memeriahkan acara.

Dengan mengusung tema **Harmoni dalam Kebinekaan di Bumi Tambun Bungai**, Kota Palangkaraya sebagai tuan rumah ingin memberikan pesan bahwa Kota Palangkaraya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kota Palangkaraya dapat diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Di kota ini berbagai suku bangsa dapat hidup rukun dalam keberagaman. Seperti itulah yang selalu kita harapkan pada negeri kita Indonesia, negeri yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Meskipun demikian, diharapkan masyarakatnya dapat hidup rukun, bersatu, dan saling bahu membahu dalam memajukan negeri ini.

Pramuka yang turut serta dalam kegiatan Kemah Budaya Nasional Tahun 2017, merupakan anggota pramuka tingkat Penggalang seluruh Indonesia dari 34 Provinsi (setiap provinsi mengirimkan 2 regu, setiap regu terdiri dari 8 penggalang dan 1 pembina), 38 regu dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya, 4 regu dari negara sahabat, para Narasumber dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kwartir Nasional, Pemerintah Daerah, dan Budayawan, Panitia

dari Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Panitia daerah dari Pemerintah Kota Palangkaraya, serta Kwardcab dan Kwarran di Kota Palangkaraya. Diperkirakan tidak kurang dari 1000 orang berkumpul di Kota Palangkaraya pada saat pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya Nasional tahun 2017.

Rangkaian kegiatan dalam Kemah Budaya Nasional berfokus pada materi kebudayaan yang cukup kental. Untuk itu, materi budaya yang dikenalkan kepada para peserta dalam kegiatan perkemahan budaya adalah berupa studi pengamatan lingkungan dan perilaku budaya masyarakat di sekitar lokasi perkemahan. Selain itu juga ada kegiatan lain yang dapat memberikan tambahan wawasan budaya setempat bagi para peserta. Kegiatan Kemah Budaya dilaksanakan selama seminggu, dimana peserta dibagi-bagi menjadi beberapa regu dan menetap di dalam kemah. Adapun Ruang lingkup kegiatan Kemah Budaya terdiri dari: Kegiatan Pengantar, Kegiatan Inti dan Kegiatan Pelengkap. Kegiatan Pengantar, Kegiatan Rutin/Harian, Kegiatan Inti/Pokok, dan Kegiatan Pelengkap. Kegiatan Pengantar meliputi Orientasi Kemah Budaya Nasional. Kegiatan Rutin/Harian meliputi ibadah harian, olahraga, upacara pengibaran dan penurunan bendera, dan pemutaran film. Kegiatan Inti/Pokok meliputi





Upacara Pembukaan, Permainan Per-saudaraan, Jumpa Tokoh/Budayawan, Giat Prestasi Kesejarahan, Permainan Tradisional dan Rekreatif, Festival Kuliner Nusantara, Seni Kriya (Bahan Daur Ulang), Napak Tilas Kesejarahan, Penjelajahan Budaya, Api Unggun dan Wisuda, Karnaval Budaya dan Upacara Penutupan, Lomba Cerdas Cermat, dan Pentas Seni. Kegiatan Pelengkap meliputi Sosialisasi Saka Widya Budaya Bakti, Aksi Pramuka Peduli Sesama dan Lingkungan, dan Gerakan Literasi Pramuka.

Melalui Kemah Budaya Nasional, diharapkan anggota Pramuka tingkat Penggalang se-Indonesia, dapat mengamati dan memahami aspek-aspek budaya yang ada dilingkungan masyarakatnya. Pemahaman tersebut dapat ditularkan kepada anggota pramuka lainnya, terutama pada tingkatan yang lebih rendah, dan berlangsung secara terus-menerus, khususnya di kalangan pramuka. Selain itu yang lebih penting lagi, para Pramuka Penggalang peserta Kemah Budaya Nasional disiapkan agar kelak menjadi manusia berjiwa Pancasila yang mampu hidup bersama dengan rukun dalam keanekaragaman serta menjadi warga negara yang mandiri, peduli dan bertanggungjawab terhadap pelestarian budaya dan bangsa. ●



Lawatan Sejarah Nasional 2017

Provinsi Bengkulu, 14-18 Mei 2017

“Dengan dilaksanakannya kegiatan Lasenas 2017 diharapkan generasi muda semakin mencintai bangsanya, dengan mencintai bangsanya timbulah rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa.”

(Prof. Dr. Muhadjir Effendy)

Sejarah, sebagai memori kolektif masa lalu, berperan penting dalam terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada tiga fungsi mengapa orang harus memahami sejarah. Ketiga fungsi itu adalah sebagai pengingat, pengikat, dan penyemangat. Dalam perjalanannya, terdapat proses panjang yang meminta pengorbanan yang tidak sedikit.

Perjuangan leluhur bangsa ini perlu dihargai, dihormati dan dilestarikan nilai-nilai kesejarahannya.

Untuk membangkitkan ingatan dan inspirasi, menampilkan teladan dan motivasi yang kuat untuk penanaman karakter pada generasi muda, dan perlunya menyampaikan pada generasi muda pentingnya belajar sejarah tanpa harus mendikte dan menggurui,





Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajak generasi muda melawat kesejarahan di Bengkulu dalam konteks sejarah nasional pada kegiatan Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas). Lawatan sejarah adalah suatu kegiatan perjalanan mengunjungi situs bersejarah yang merupakan bagian dari simpul-simpul perekat yang berorientasi pada nilai-nilai perjuangan dan persatuan untuk memperkokoh integrasi bangsa. Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) 2017 akan menyusuri sejarah perjalanan daerah Bengkulu sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa.

Jika masih ada ungkapan bahwa penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun, sesungguhnya hanya sebuah mitos karena dapat dibantah dengan episode Inggris di Bengkulu. Belanda baru benar-benar masuk ke Bengkulu pada tahun 1824 sebagai konsekuensi dari perjanjian antara Inggris dan Belanda yang dikenal dengan Traktat London. Setelah itu Inggris (Raffles) pindah ke Singapura, dan meninggalkan Benteng Marlborough yang dibangunnya di Bengkulu.

Pada abad ke 19 pemerintah kolonial Belanda menghadapi perlawanan diberbagai daerah di kepulauan Indonesia. Pemerintah kolonial kemudian menjadikan Bengkulu sebagai salah satu tempat pengasingan bagi para tawanan. Tercatat beberapa tokoh pernah diasingkan ke Bengkulu. Setelah Perang Diponegoro di Jawa (1825-1830), Sentot Alibasya, seorang panglima terkemuka Pangeran Diponegoro, bersama dengan keluarga dan pasukannya diasingkan mula-mula ke Batavia lalu ke Bengkulu hingga akhir hayat dan dimakamkan di sana.

Pada tahun 1883 ada 18 bangsawan Yogyakarta dibawa ke Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, pada tanggal 3 April 1908, pemerintah kolonial menginternir Ida Bagus Arka dari Bali ke Bengkulu. Kemudian Alexander Jacob Patty, seorang putra Ambon, karena kegiatan politiknya dengan mendirikan Sarekat Ambon bersama dengan rekan-rekannya, juga pernah diasingkan ke Bengkulu, kemudian dipindahkan ke Ruteng, dan Boven-Digul.

Sukarno juga pernah diasingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1938, saat pengasingan di Ende, Flores, Sukarno

Kiprah

mengalami sakit keras. Karena sakit tersebut, Sukarno oleh pemerintah kolonial kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu pula, Sukarno bertemu dengan Fatmawati.

Kegiatan Lasenas 2017 diikuti oleh siswa-siswi SMA/SMK/MA/ sederajat terpilih yang ditetapkan dari hasil Lawatan Sejarah Daerah (Laseda) yang diselenggarakan oleh 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), guru-guru sejarah tingkat SMA, BPNB, Instansi terkait, Narasumber, Wartawan, dan pengampu kepentingan di bidang sejarah. Total jumlah peserta dan panitia sebanyak 200 orang. Lasenas juga dimeriahkan dengan lomba karya tulis sejarah tingkat SMA/ sederajat, dan sepuluh makalah terbaik mempresentasikan makalahnya, serta mendapatkan hadiah serta piagam penghargaan.

Hari pertama, Minggu 14 Mei 2017, kedatangan peserta dari seluruh Indonesia ke Bengkulu, registrasi dilakukan di Hotel Amaris Bengkulu. Sore harinya, pukul 16.00-17.00 diadakan *ice breaking* dan perkenalan antar peserta yang dipandu oleh L.O.

Pada pukul 19.00 sampai 21.00 WIB acara dilanjutkan dengan Dialog Kesejarahan di Hotel Putri Gading Bengkulu. Dialog ini menghadirkan dua sejarawan dari Bengkulu sebagai pembicara yaitu Bapak Ade Hapriwijaya dan Bapak Dr. Agus Setyanto. Dalam pemaparannya, Bapak Dr. Agus Setyanto menyampaikan pentingnya ber-fikir historis yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Agus Setyanto mencontohkan dengan asal-usul nama diri, bagaimana sejarah nama itu muncul, siapa yang memberi nama itu untuk kita dan apa arti nama kita. Beliau juga mengingatkan akan pentingnya mencatat silsilah keluarga, karena suatu saat itu dapat digunakan sebagai pengingat jaringan kekeluargaan.

Bapak Ade Hapriwijaya dalam pemaparannya



menyampaikan sejarah dan etnografi Bengkulu. Terdapat sembilan suku bangsa yang mendiami Provinsi Bengkulu yaitu Muko-muko, Pekal, Lebak, Rejang, Melayu Bengkulu, Serawai, Pasemah, Kaur, dan Enggano. Dalam paparannya beliau juga menyampaikan salah satu momen penting dalam sejarah Bengkulu adalah pertemuan Sukarno dengan Fatmawati. Sejarah mencatat, Fatmawati sebagai istri Sukarno, ibu negara pertama Indonesia juga turut andil dalam kemerdekaan dengan menjahit Sang Saka Merah Putih.

Fort Marlborough menjadi tempat persinggahan pertama dari keseluruhan perjalanan kegiatan Lawatan Sejarah Nasional 2017. Benteng pertahanan militer ini dibangun oleh kolonial Inggris pada tahun 1714-1719. Fort Marlborough adalah benteng terbesar yang didirikan Inggris selama berkuasa di Asia Tenggara. Fort Marlborough menggantikan Benteng York yang sebelumnya dibangun pada tahun 1685, dikarenakan lokasi Benteng York yang dikelilingi rawa menyebabkan tentara Inggris terjangkit penyakit disentri, kolera, dan malaria.

Penguasaan Fort Marlborough sempat berpindah tangan dari Inggris ke Belanda yang ditandai dengan penandatanganan Traktat London pada 17 Maret 1824. Pada masa pendudukan Jepang, 1942-1945, benteng dikuasai Jepang yang difungsikan sebagai tempat pengintai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Fort Marlborough digunakan TNI AD (1950-1983) dan pernah menjadi markas Kodim 0407. Pemerintah kemudian menetapkan Fort Marlborough sebagai cagar budaya tahun 2004.

Persinggahan kami berikutnya adalah Museum Negeri Provinsi Bengkulu. Rombongan diterima oleh Kepala Museum Bapak Nirwan Sukandri. Pada awal berdirinya, tahun 1980, museum hanya memiliki 51 koleksi, kini koleksi museum berjumlah 6.151 koleksi. Koleksi-koleksi tersebut meliputi koleksi biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, filologi, dan teknologi. Pengunjung yang datang bisa melihat bukti sejarah Bengkulu dari masa ke masa, sejak era prasejarah, masuknya agama, hingga zaman perjuangan kemerdekaan. Juga dipamerkan rumah adat, senjata tradisional, hingga alat musik.

Selanjutnya rombongan singgah di replika Rumah Ibu Fatmawati yang terletak di jalan Fatmawati kota Bengkulu. Meski replika, rumah ini benar-benar dikondisikan seperti aslinya, berwarna coklat dan berbentuk rumah panggung. Rumah ini sebagai pengganti



rumah aslinya yang terletak di jalan S. Parman yang kini sudah tidak ada lagi.

Persinggahan selanjutnya adalah Rumah Pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pemerintah telah menetapkannya sebagai bangunan cagar budaya sejak tahun 2004. Rumah tersebut sudah ada sejak 1918, dibangun oleh seorang Tionghoa bernama Tjang Tjeng Kwat. Benda-benda yang terkait dengan aktivitas Sukarno selama diasingkan di Bengkulu tersimpan dengan rapi di Rumah Pengasingan. Beberapa koleksi peninggalannya antara lain sepeda, lemari kayu, kursi dan meja tamu, dan buku-buku berbahasa Belanda. Salah satu ruangan juga menampilkan lemari penuh koleksi kostum perkumpulan sandiwara Monte Carlo asuhan Bung Karno.

Di Rumah Pengasingan Sukarno ini pula dilaksanakan secara resmi pembukaan kegiatan Lawatan Sejarah Nasional 2017 Provinsi Bengkulu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam sambutannya, Ibu Puan Maharani mengingatkan peserta Lasenas 2017 mengenai nasihat dari Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau biasa disingkat dengan Jas

Merah. Menurutnya, hanya dengan mengenal sejarah bangsa, mengetahui akar sejarah barulah kita bisa mengimplementasikan empat pilar dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan ini, Ibu Puan Maharani juga membagi-bagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada siswa-siswi dan masyarakat Bengkulu. Ibu Puan Maharani juga memberikan kuis yang berhadiah sepeda. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan Lasenas 2017 diharapkan generasi muda semakin mencintai bangsanya, dengan mencintai bangsanya timbulah rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa.

Pada malam harinya, pukul 19.00-21.00 WIB dilaksanakan Presentasi Lomba Karya Tulis Sejarah dari 10 makalah terpilih yang diseleksi oleh dewan juri. Dari 106 makalah para peserta, dewan juri menyeleksi 10 makalah terbaik untuk dipresentasikan, untuk selanjutnya ditentukan terbaik 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3, yang akan diumumkan pada saat penutupan.

Pukul 07.00 WIB, Selasa 16 Mei 2017, rombongan peserta Lasenas memulai perjalanan menuju Kabupaten Kepahiang. Destinasi pertama di hari ketiga ini yang

Kiprah



dituju adalah Kebun Teh Kabawetan, sebuah perkebunan teh peninggalan Belanda yang masih beroperasi hingga saat ini. Rombongan disambut oleh Bupati Kepahiang, Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., beserta SKPD Kabupaten Kepahiang. Dalam sambutannya Bupati Kepahiang menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya perkebunan teh Kabawetan menjadi salah satu tujuan dari kegiatan Lasenas 2017. Beliau juga menyampaikan bahwa perkebunan teh Kabawetan memiliki nilai historis karena sudah mulai beroperasi sejak masa kolonial Belanda yaitu tahun 1933. Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih, M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain belajar sejarah, peserta Lasenas 2017 juga membantu mempromosikan wisata sejarah yang mereka kunjungi. Sepulang ke daerah masing-masing, para peserta yang terdiri dari siswa-siswi SMA/ sederajat dan guru-guru sejarah ini akan bercerita kepada orang-orang disekitarnya mengenai wisata Kepahiang, produk unggulan Kepahiang berupa teh dan kopi, serta keramahan orang-orang Kepahiang.

Perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten Lebong, destinasi yang akan kami tuju adalah Gua Kacamata, sebuah tambang emas yang sudah beroperasi sejak masa kolonialisme. Dengan menempuh jarak sekitar

126 km dari kota Bengkulu, gerbang putih bertuliskan “Selamat Datang” menyambut kami. Lidah api emas yang berada di puncak Monumen Nasional (Monas) di ibu kota Jakarta berasal dari tambang emas di Kabupaten Lebong ini, tepatnya dari Desa Lebong Tandai. Penemuan deposit emas sejak abad 19 menjadikan Kabupaten Lebong sebagai pusat penambangan emas hingga abad 20. Hingga kini sebagian masyarakat masih melakukan penambangan emas secara tradisional.

Rombongan peserta Lasenas 2017 menginap satu malam di Kabupaten Lebong. Pada malam harinya, pukul 19.00-22.00 WIB rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Lebong, Wawan Fernandez diiringi dengan tari-tarian tradisional.

Pagi hari, Rabu 17 Mei 2017, kami kembali bertolak menuju Kota Bengkulu, lawatan berikutnya yang kami tuju adalah Makam Sentot Alibasya. Sentot Alibasya adalah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa tahun 1825-1830. Tahun 1829 ia diasingkan oleh Belanda ke Bengkulu hingga wafat dan dimakamkan disana.

Selanjutnya rombongan menuju Masjid Jamik Bengkulu. Masjid yang dirancang oleh Bung Karno ini sebelumnya adalah hanya sebuah surau kecil yang oleh

warga sekitar disebut Surau Lamo. Masjid yang berlokasi di Kelurahan Pengantungan ini kemudian dirombak sesuai dengan hasil rancangan Bung Karno dan dikerjakan oleh warga.

Malam harinya dilak-sanakan penutupan kegiatan Lawatan Sejarah Nasional 2017 Provinsi Bengkulu di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu yang merupakan bekas istana Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dalam sambutannya, ketua pelaksana kegiatan Lasenas 2017 sekaligus mewakili Direktur Sejarah, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih M.Hum., mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh *stakeholder* yang ikut terlibat dalam kelancaran kegiatan Lasenas 2017. Beliau juga menyampaikan banyak pelajaran yang bisa dipetik peserta selama perjalanan, bahwa sejarah bukan ilmu yang dihafal, justru pengetahuan sejarah adalah cakrawala yang mengantar setiap orang untuk mengenal dunia. Mengenal sejarah lokal tiap daerah di Indonesia, dapat dipastikan peserta tidak akan tertinggal pengetahuannya dibandingkan anak dari belahan dunia lain.

Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pengumuman dan penyerahan hadiah lomba karya tulis sejarah. Dari hasil penilaian dewan juri, juara 1 diterima oleh Embun Ayudya Pawestri dari SMA N 1 Kalasan Yogyakarta dengan judul makalah *"Menggali Gagasan Nasionalisme Bung Karno dalam Bidang Seni dan Sastra Semasa Pengasingan Di Bengkulu (Analisis atas Naskah*

Chungking Jakarta)", juara 2 Ihza Arvianita Hardina dari SMA N 1 Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah dengan judul makalah *"Membangun Ingatan Bersama tentang Keberagaman: Komik Chungking Djakarta"*, dan juara 3 Radinda Faridzya Fitriyanto dari SMA N 1 Pontianak Kalimantan Barat dengan judul makalah *"Media Sparkol Videoscribe Berbasis Medsos Merekat Keberagaman dalam Bingkai Kebhinekaan untuk Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia"*. Kemudian berturut-turut juara harapan satu hingga tiga adalah Bastian Eldi dari SMA N 1 Pentagon Kaur Bengkulu dengan judul makalah *"Bengkulu di Jembatan Tabarenah Kabupaten Rejang Lebong Pada Masa Pendudukan Jepang Luput dari Sejarah (Bengkulu dalam Bingkai Sejarah Indonesia)"*, Dedi Irawan dari SMA N 1 Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan judul makalah *"Merajut Kembali Bingkai Sejarah yang Terkoyak di Anggut atas Kota Bengkulu"*, dan Sinta Sari Sekaring Puri dari SMA N 91 Jakarta dengan judul makalah *"Menelusuri Jejak Sukarno di Bengkulu: Pengasingan Serta Pengaruhnya Bagi Semangat Juang Generasi Muda"*.

Kegiatan Lawatan Sejarah Nasional 2017 kemudian secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Gotri Suyanto, S.E., M.Soc.,Sc. Acara penutupan diakhiri dengan Pentas Multikultur oleh peserta Lasenas 2017. Setiap peserta menampilkan kesenian daerah masing-masing. Keesokan harinya semua peserta kembali ke daerah masing-masing. ●



Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah

Generasi muda sebagai bagian dari bangsa perlu mengetahui sejarah bangsanya. Oleh karena itu, dengan merekam dan membuat karya sendiri yang mengangkat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerahnya, diharapkan akan lebih mengenal sejarahnya, sehingga muncul rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, yang pada akhirnya menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah (LKAS) adalah lomba di bidang audiovisual yang mengangkat sejarah maupun budaya masyarakat lokal, terutama yang ada di sekitar peserta. LKAS pertama kali diadakan pada tahun 2012, sebagai upaya dari Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dalam menanamkan rasa nasionalisme dan membentuk karakter bangsa dikalangan generasi muda. Lomba ini bertujuan agar siswa aktif dalam mencari sumber sejarah yang ada di sekitar lingkungannya. Sumber sejarah yang telah mereka dapatkan kemudian dikemas dalam bentuk audiovisual.





Generasi muda sebagai bagian dari bangsa perlu mengetahui sejarah bangsanya. Oleh karena itu dengan merekam dan membuat karya sendiri yang mengangkat peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di daerahnya, generasi muda diharapkan akan lebih mengenal sejarahnya, sehingga muncul rasa cinta dan bangga terhadap tanah air, yang pada akhirnya menumbuhkan tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan kurikulum sekolah yang bermuatan lokal dimana hasilnya dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar yang menarik.

Pada tahun 2017 ini kegiatan LKAS mengambil tema "Kita Indonesia." Dengan tema ini para pelajar diharapkan mampu mengangkat sejarah di daerahnya masing-masing, dimana sejarah yang beragam itu membentuk mosaik yang indah, yakni Indonesia. Tahun ini panitia menerima 371 proposal ide cerita dari 34 Provinsi di Indonesia, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 259 proposal. Kesuksesan LKAS 2016 menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah proposal masuk tahun ini, di samping jumlah hadiah yang lebih besar di tahun ini.

Rekapitulasi Proposal Masuk LKAS 2017

| NO. | PROVINSI | JUMLAH |
|-----|-----------------|--------|
| 1 | Aceh | 26 |
| 2 | Bangka Belitung | 3 |
| 3 | Banten | 16 |
| 4 | Bengkulu | 10 |

| | | |
|--------------|---------------------|------------|
| 5 | D.I. Yogyakarta | 8 |
| 6 | DKI Jakarta | 8 |
| 7 | Jambi | 1 |
| 8 | Jawa Barat | 15 |
| 9 | Jawa Tengah | 42 |
| 10 | Jawa Timur | 80 |
| 11 | Kalimantan Utara | 3 |
| 12 | Kalimantan Barat | 2 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 2 |
| 14 | Kalimantan Tengah | 2 |
| 15 | Kalimantan Timur | 4 |
| 16 | Kepulauan Riau | 8 |
| 17 | Lampung | 4 |
| 18 | Riau | 11 |
| 19 | Sumatera Barat | 12 |
| 20 | Sumatera Selatan | 13 |
| 21 | Sumatera Utara | 25 |
| 22 | Bali | 9 |
| 23 | Gorontalo | 2 |
| 24 | Maluku | 1 |
| 25 | Maluku Utara | 2 |
| 26 | Nusa Tenggara Barat | 5 |
| 27 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
| 28 | Papua | 3 |
| 29 | Papua Barat | 3 |
| 30 | Sulawesi Barat | 6 |
| 31 | Sulawesi Selatan | 5 |
| 32 | Sulawesi Tengah | 9 |
| 33 | Sulawesi Tenggara | 30 |
| TOTAL | | 371 |

Kiprah

LKAS 2017 dimulai sejak Februari, pada bulan April terpilih 30 tim yang dinyatakan lolos seleksi proposal, dan bulan Mei dilakukan workshop perekaman. Workshop perekaman dilaksanakan di dua tempat, masing-masing Bogor untuk Tim yang berasal dari Wilayah Barat, dan Makassar untuk Tim yang berasal dari Wilayah Timur. Tujuan diadakannya workshop perekaman ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta mengenai teknik pembuatan film dokumenter, serta pemahaman akan sejarah dan budaya.

Workshop Perekaman Wilayah Barat diadakan di Hotel Puri Avia, Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis s.d. Senin, tanggal 4 s.d. 8 Mei 2017. Selain diisi dengan pemberian materi, dalam kegiatan ini juga diadakan ekskursi ke Kebun Raya Bogor dan Balai Kirti (Museum Presiden) pada hari Sabtu, 6 Mei 2017. Peserta workshop berjumlah 15 Tim dari Wilayah Barat yang lolos tahap seleksi proposal. 15 Tim tersebut adalah:

| NO. | NAMA SEKOLAH | PROVINSI |
|-----|------------------------------|------------------|
| 1. | SMA Negeri 15 Takengon | Aceh |
| 2. | SMA Negeri 1 Indrapuri | Aceh |
| 3. | SMA Negeri 1 Matauli Pandan | Sumatera Utara |
| 4. | SMA Negeri 1 Tilatang Kamang | Sumatera Barat |
| 5. | SMA Negeri 17 Palembang | Sumatera Selatan |

| | | |
|-----|---------------------------------|----------------|
| 6. | SMK Negeri 1 Kandis | Riau |
| 7. | MA Al-Ma'ruf Margodadi | Lampung |
| 8. | SMA Negeri 2 Bengkulu | Bengkulu |
| 9. | SMA Kharisma Bangsa | Banten |
| 10. | SMA Citra Kasih, Jakarta | DKI Jakarta |
| 11. | SMA Negeri 1 Sindang, Indramayu | Jawa Barat |
| 12. | SMK Muhammadiyah Pekalongan | Jawa Tengah |
| 13. | MAN 1 Yogyakarta | D.I Yogyakarta |
| 14. | SMA Taruna Harapan, Mojokerto | Jawa Timur |
| 15. | SMA Negeri 1 Blitar | Jawa Timur |

Workshop Perekaman Wilayah Timur dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 23 Mei 2017, di Ibis Styles Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini ekskursi dilaksanakan hari Minggu, 21 Mei 2017 di Benteng Rotterdam dan Komplek Benteng Somba Opu. Para peserta terdiri atas 15 Tim dari Wilayah Timur yang lolos tahap seleksi proposal. 15 Tim tersebut adalah:

| NO. | NAMA SEKOLAH | PROVINSI |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1. | SMA Negeri 1 Susut Pure, Bangli | Bali |
| 2. | SMK Negeri 2 Kuripan | NTB |
| 3. | SMA Negeri 1 Amanuban Selatan | NTT |





| | | |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 4. | SMA Negeri 1 Pontianak | Kalimantan Barat |
| 5. | SMA Negeri 5 Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 6. | SMA Negeri 1 Sebatik | Kalimantan Utara |
| 7. | SMA Negeri 4 Berau | Kalimantan Timur |
| 8. | SMA Al-Azhar Mandiri Palu | Sulawesi Tengah |
| 9. | SMA Negeri 9 Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 10. | SMA Negeri 2 Watansoppeng | Sulawesi Selatan |
| 11. | MAN Model Kota Gorontalo | Gorontalo |
| 12. | SMK Negeri 7 Ambon | Maluku |
| 13. | SMA Negeri 1 Ternate | Maluku Utara |
| 14. | SMA YPPK Santo Thomas Wamena | Papua Barat |
| 15. | MAN Model Kota Sorong | Papua |

Workshop Perekaman dibuka oleh Direktur Sejarah, Dra. Triana Wulandari, M.Si. Dalam sambutannya Direktur Sejarah mengatakan menggali dan membangkitkan nilai kebangsaan dan sejarah bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran yang berbeda. Salah satunya adalah melalui lomba Kreasi Audio Visual Sejarah.

Workshop ini melibatkan para profesional di bidangnya untuk memberikan materi kepada para peserta. Para profesional yang terlibat adalah M. Abduh Aziz (Direktur PPFN), Bondan Kanumoyoso (Dosen Sejarah Universitas Indonesia), Jabatin Bangun (Dosen KJ), Ichang Tisnamiharja (PPFN), dan M. Iqbal (PPFN). Materi yang diberikan sangat bervariasi, mulai dari Pengantar Penelitian Antropologi Budaya, Pengantar Dasar Penelitian Sejarah, Dasar-dasar Dokumenter,

Materi bahasa visual dan suara, hingga penyutradaraan & praktik pengambilan gambar.

Dengan materi yang komprehensif ini para peserta diharapkan memiliki bekal yang cukup untuk melakukan perekaman di daerah masing-masing, sehingga dapat menghasilkan film yang berkualitas. ●



Sistem Informasi Geografis Kesejarahan

Jika Bisa Terbuka Untuk Apa Tertutup?

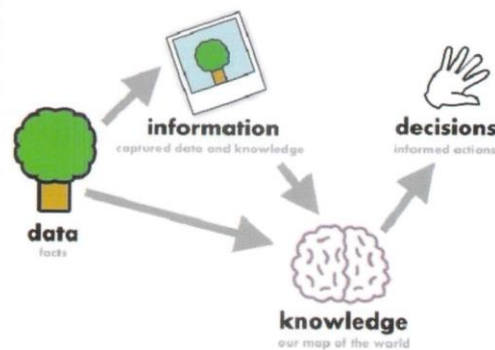
“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”
(Pasal 2 Ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik)

Latar Belakang

Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Sejarah terus berkesinambungan sehingga merupakan rentang peristiwa yang panjang. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan perjalanan sejarah yang panjang dalam dinamika pembentukannya. Berbagai macam peristiwa sejarah mengawal proses terbentuknya negeri ini. Perjalanan sejarah Indonesia memiliki keunikan di tiap-tiap daerahnya, hal ini dikarenakan kondisi geografisnya yang menyebabkan perbedaan karakteristik antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dinamika perjalanan sejarah di Indonesia dapat menjadi informasi yang berharga bagi generasi saat ini, karena dengan mengetahui dan memahami peristiwa sejarah yang

pernah terjadi kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berharga. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, penyajian informasi kesejarahan dalam sebuah produk berbasis teknologi informasi mutlak dibutuhkan.

Kebutuhan akan data dan informasi yang cepat dan akurat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini. Teknologi dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dan vital, dengan menguasai teknologi dan informasi, masyarakat memiliki modal untuk menjadi pemenang dalam persaingan global. Teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dibanyak kalangan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kemampuan teknologi informasi dan multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat strategis.



Data dan informasi yang valid dapat menjadi rujukan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan (sumber: <http://www.pro.co.id/pengertian-dan-perbedaan-data-informasi-dan-teknologi-informasi/>)



Penyajian informasi kesejarahan saat ini tidak hanya terbatas pada keterangan berupa atribut saja, tetapi perlu ditambahkan dengan informasi keruangan (spasial) berupa peta sehingga dapat memberikan sebuah informasi yang lebih komperhensif bagi masyarakat luas. Informasi data kesejarahan dengan media peta diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran yang cepat, tepat dan akurat bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan.

Keterbukaan Informasi

Manusia dengan segala macam aktivitasnya saat ini menuntut adanya media informasi yang cepat, tepat dan akurat. Kemajuan teknologi memungkinkan informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap badan publik, eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk memberi ruang bagi seluruh warga negara dalam mengakses informasi dari lembaga pemerintah dan non pemerintah, konsekuensinya setiap lembaga pemerintah dan non pemerintah diwajibkan untuk membuka diri pada publik dan memberikan pelayanan prima kepada mereka yang membutuhkan informasi.

Direktorat Sejarah, sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Direktorat Sejarah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelestarian sejarah
2. Peningkatan dan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan
3. Pelaksanaan dokumentasi dibidang kesejarahan

Guna mendukung terciptanya keterbukaan dan penyebarluasan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada publik, pada tahun anggaran 2017 Direktorat Sejarah membuat program pengembangan Sistem Informasi Geografis Kesejarahan (SIGS) berbasis web. Sistem Informasi Geografis Kesejarahan atau SIGS adalah sebuah sistem informasi online berbasis SIG yang berisi tema-tema sejarah tertentu. SIG atau Sistem Informasi Geografis yang dimaksud di sini adalah sistem yang dirancang untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat geografis. Program ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya sebuah sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan pengelolaan database kesejarahan menggunakan teknologi WebGIS.

Sistem informasi ini diharapkan dapat menjadi media penyebaran informasi kesejarahan yang cepat, tepat, dan akurat bagi masyarakat. Sesuai dengan misi



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, serta pelestarian kebudayaan. Sistem informasi kesejarahan yang integratif juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan di bidang kebudayaan pada umumnya dan sejarah pada khususnya. Selain bermanfaat bagi masyarakat, informasi yang cepat, tepat, dan akurat dapat pula menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan sebuah kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Perlunya Sistem Informasi Kesejarahan yang Komprehensif

Keberagaman budaya di Indonesia tidak terlepas dari perjalanan sejarahnya. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari beribu pulau yang dipisahkan oleh lautan menyebabkan daerah-daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah bangsa dengan perjalanan sejarah yang panjang. Mulai dari masa prasejarah hingga modern, kita tidak pernah lepas dari peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar kita

Sebagai salah satu institusi pemerintahan, Direktorat Sejarah merasa perlu mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi

kesejarahan. Pepatah mengatakan “tak kenal maka tak sayang”, menunjukkan perlunya generasi muda Indonesia diberikan informasi/pengetahuan mengenai sejarah bangsanya sehingga dapat lebih meningkatkan rasa Nasionalisme. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pelestarian kebudayaan akan sulit dilakukan jika masyarakat kita belum mendapatkan edukasi tentang pentingnya kebudayaan itu sendiri. Dari sinilah maka dirasa perlu adanya sebuah media informasi yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka memahami pentingnya kebudayaan itu sendiri.

Pemberian informasi yang salah mengenai perbedaan budaya dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu penyampaian informasi harus dilakukan secara benar. *Hoax* atau pemberian informasi yang tidak benar kepada masyarakat dapat menyebabkan

terjadinya perpecahan antar masyarakat. Pengelolaan informasi yang salah dapat menjadi pangkal permusuhan yang terjadi di masyarakat. Jadi meskipun dengan adanya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak serta merta memberikan akses untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan, namun juga harus tetap memperhatikan validitas (keabsahan) dari informasi itu sendiri.





Begitu banyaknya data dan informasi kesejarahan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun keabsahan dari data dan informasi tersebut masih perlu diuji lagi. Verifikasi data dan informasi perlu dilakukan sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di kemudian hari. Direktorat Sejarah sebagai salah satu institusi pemerintahan yang memiliki fungsi pembinaan dan pelestarian sejarah, serta peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan dirasa perlu memiliki sebuah media informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai sejarah Indonesia.

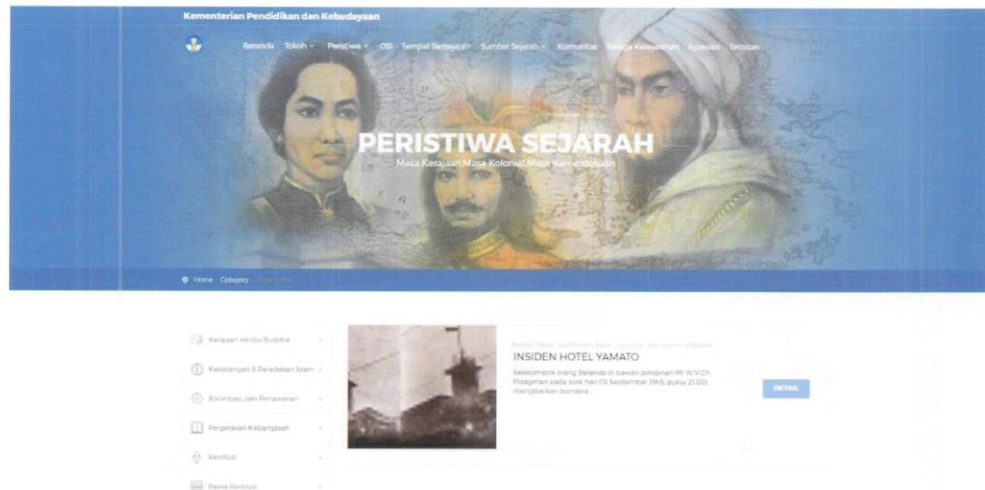
SIG Kesejarahan merupakan media informasi online komprehensif yang dibuat oleh Direktorat Sejarah untuk menyebarkan informasi kesejarahan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Semakin berkembangnya teknologi saat ini menuntut adanya media informasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Internet saat ini sudah bukan lagi menjadi monopoli kaum urban saja untuk memperoleh informasi. Masyarakat yang tinggal di pedesaan pun saat ini sudah dapat mengakses internet secara mudah. SIG Kesejarahan diharapkan dapat memenuhi dahaga masyarakat akan informasi kesejarahan komprehensif yang valid sehingga proses internalisasi nilai-nilai kesejarahan dapat terwujud. SIG Kesejarahan ini juga diharapkan dapat menjadi media informasi yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai sejarah Indonesia kepada masyarakat sehingga mereka memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

Proses pembuatan SIG Kesejarahan tidak hanya

melibatkan instansi internal Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Setditjen Kebudayaan), tapi juga beberapa pihak luar yang berkaitan, seperti Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (Direktorat KKKS), Kementerian Sosial, dan Sejarawan Universitas Indonesia. Pelibatan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi kesejarahan yang lengkap dan terpercaya bagi masyarakat. Setditjen Kebudayaan dilibatkan pada program ini dalam rangka mengsinergikan data-data kesejarahan dengan data-data kebudayaan yang terdapat dalam Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) yang saat ini sedang dibangun oleh Sub Bagian Data dan Informasi Setditjen Kebudayaan. Hal ini juga sekaligus untuk mendukung kebijakan pendataan kebudayaan yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, sehingga program-program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan akan mempermudah dalam menyusun perencanaan, moni-toring dan evaluasi pem-bangunan kebudayaan dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional. Keterlibatan Direktorat KKKS dalam program ini adalah untuk mendapatkan data-data mengenai pahlawan nasional sebagai salah satu informasi kesejarahan yang terdapat dalam SIG Kesejarahan. Sejarawan Universitas Indonesia dilibatkan dalam proses verifikasi data yang ada sehingga informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat adalah informasi yang benar.

SIG Kesejarahan

Sistem Informasi Geografis Kesejarahan (SIGS) yang dibangun oleh Direktorat Sejarah memiliki beberapa menu



yang menyajikan informasi kesejarahan. Menu-menu ini terbagi atas dua kelompok, yaitu menu yang berkaitan dengan informasi kesejarahan bangsa Indonesia dan menu yang berkaitan dengan produk internal Direktorat. Menu-menu yang terkait dengan informasi kesejarahan bangsa Indonesia adalah: Tokoh Sejarah, Peristiwa Sejarah, Organisasi dalam Sejarah Indonesia, Tempat Bersejarah, Sumber Sejarah, Komunitas, dan Tenaga Kesejarahan, sedangkan yang terkait dengan produk internal Direktorat adalah: Apresiasi dan Terbitan.

A. Tokoh Sejarah

Menu ini terdiri atas tiga bagian yaitu Pahlawan Nasional, Tokoh Nasional, dan Tokoh Lokal.

1. Pahlawan Nasional

Menu ini berisikan informasi mengenai tokoh sejarah Indonesia tokoh pada masa lampau yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Kementerian Sosial..
2. Tokoh Nasional

Menu ini berisikan informasi mengenai tokoh pada masa lampau yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia namun belum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.
3. Tokoh Lokal

Menu ini berisikan informasi mengenai tokoh pada masa lampau yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan

daerah tertentu/lokal. Sama dengan Pahlawan Nasional, menu ini juga berisi profil singkat dari tokoh dan riwayat perjuangannya semasa hidup

B. Peristiwa Sejarah

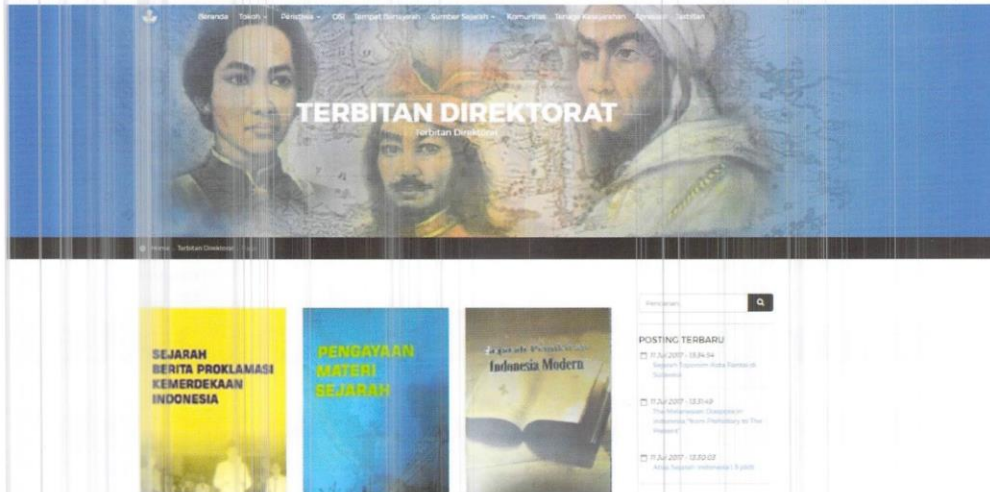
Menu Peristiwa Sejarah berisikan informasi mengenai peristiwa pada masa lampau yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia. Menu ini dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu: Kerajaan Hindu-Buddha, Kedatangan dan Peradaban Islam, Kolonisasi dan Perlawanan, Revolusi, Paska Revolusi, Orde Baru dan Reformasi.

1. Kerajaan Hindu-Buddha

Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa pada periode kerajaan Hindu-Buddha di nusantara yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
2. Kedatangan dan Peradaban Islam

Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa pada periode kesultanan Islam di nusantara yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
3. Kolonisasi dan Perlawanan

Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa pada masa kolonisasi dan perlawanan di daerah yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.



4. Pergerakkan Kebangsaan
Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa pada saat pergerakan nasional yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
 5. Revolusi
Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa pada saat terjadi revolusi yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
 6. Paska Revolusi
Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa paska revolusi kemerdekaan yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
 7. Orde Baru dan Reformasi
Menu ini berisikan informasi mengenai peristiwa seputar masa orde baru dan reformasi yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
- C. Organisasi dalam Sejarah Indonesia (OSI)**
Menu ini menampilkan informasi mengenai organisasi pada masa lampau yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
- D. Tempat Bersejarah**
Menu ini menampilkan informasi mengenai tempat-
- tempat penting yang memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia.
- E. Sumber Sejarah**
Menu ini menampilkan informasi tentang sumber-sumber sejarah, baik yang berwujud dan tak berwujud yang berpengaruh, berperan penting, atau memiliki makna terhadap perkembangan bangsa/negara Indonesia. Menu ini dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu: Tulisan, Lisan, Audio, Visual, Audiovisual, dan Benda.
- F. Komunitas Kesenjaraan**
Menu ini menampilkan informasi tentang komunitas kesenjaraan yang ada di seluruh Indonesia.
- G. Tenaga Kesenjaraan**
Menu ini menampilkan informasi sumber daya manusia yang bergerak dibidang kesenjaraan yang ada di seluruh Indonesia.
- H. Apresiasi Kesenjaraan**
Menu ini menampilkan informasi tentang kegiatan event yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dalam rangka internalisasi nilai-nilai kesenjaraan.
- I. Terbitan Direktorat**
Menu ini menampilkan informasi tentang terbitan-terbitan Direktorat Sejarah. ●

Mencetak Tenaga Kebudayaan yang Terampil dan Berkarakter

Kursus Mahir Dasar Pembina Pramuka Saka Widya
Budaya Bakti

Pusdiklatnas Gerakan Pramuka, Cibubur, 12-19 Maret 2017

“Berjuanglah sehebat-hebatnya untuk mengembangkan dan meluaskan gerakan kita, sampai suatu ketika setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik yang mahasiswa di kota maupun yang penggembala kerbau di desa dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan “Aku Pramuka Indonesia” (Bung Karno, 14 Agustus 1961)

Berangkat dari kondisi Indonesia saat ini dimana generasi muda dihadapkan pada era informasi-digital dan globalisme, yang bila tidak diarahkan akan berdampak buruk bagi bangsa. Oleh karena itu kesadaran cinta tanah air, berbangsa dan bernegara harus terus ditanamkan dalam setiap dada generasi muda penerus bangsa. Salah satu upaya dalam mewujudkan proses penanaman nilai-nilai dasar tersebut melalui Gerakan Pramuka.

Kenapa Gerakan Pramuka dianggap strategis bagi pem-bangunan karakter generasi muda, karena sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 328 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, bahwa anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warganegara Republik Indonesia yang berkeperibadian dan berwatak luhur yang cerdas, cakap, tangkas,

terampil, dan rajin, yang sehat jasmaniah dan rohaniyah, yang berpancasila dan setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.....*1 Hal ini memberikan isyarat bahwa kepramukaan, sebagai pendidikan diluar sekolah dan sekarang menjadi diwajibkan, menjadi salah satu wadah pendidikan karakter menangkal pengaruh negatif dari luar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas/fungsi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kebudayaan, bersama unit pelaksana teknis kebudayaan merasa perlu menjadi trigger dan mendorong pendidikan karakter melalui Gerakan Pramuka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri melalui Permen Dikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib

1 Buku Saku Pramuka, Kedai Kwarnas Pramuka, hal. 14, 2017





pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pada 22 November 2013 bekerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, melalui naskah kesepakatan No. 011/PK-MOU/2013, membentuk Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan tersebut, melalui Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kwarnas Gerakan Pramuka, melaksanakan kegiatan Kursus mahir Dasar Pembina Pramuka Saka Widya Budaya Bakti di Pusdiklatnas Gerakan Pramuka pada 12-19 Maret 2017 di Cibubur.

Sejarah Pramuka

Praja Muda Karana (Pramuka) atau sebelumnya bernama Kepanduan dicetuskan oleh Baden Powell. Dalam waktu singkat kepramukaan cepat menyebar keberbagai negara termasuk Belanda yang menyebut kepramukaan dengan nama *Padvinder*.

Tidak hanya dinegaranya, ditanah jajahannya Belanda juga mendirikan organisasi kepramukaan yang diberi nama NIPV (*Netherland Indische Padvinder Vereniging*; Persatuan Pandu-Pandu Belanda). Organisasi ini dikhususkan bagi anak-anak Belanda. Hal ini menyebabkan para tokoh pergerakan nasional membentuk organisasi kepanduan dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader

pergerakan nasional. Karenanya kemudian muncul organisasi-organisasi kepramukaan pribumi, antara lain *Javananse Padvinders Organizatie* (JPO), *Jong Java Padvinderij* (JPP), Sarekat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), *Hisbul Wathon* (HW) dll.

Maraknya organisasi kepra-mukaan milik pribumi yang bermunculan, Belanda akhirnya membuat peraturan melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Karena itu kemudian KH. Agus Salim menggunakan istilah "Pandu" dan "Kepanduan". Tahun 1930 organisasi-organisasi kepanduan disatukan dalam sebuah organisasi kepanduan dengan nama Kepanduan Republik Indonesia (KBI). KBI merupakan gabungan dari organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda Sumatra). Pada tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian diubah menjadi Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.

Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan kepanduan dilarang sehingga tokoh Pandu banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA. Setelah masa kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia yang dideklarasikan di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia saat itu. Namun pada masa

Kiprah



liberalisme, kembali bermunculan berbagai organisasi kepramukaan seperti; HW, SIAP, Pandu Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Ansor, KBI dan lain-lain. Sebagian organisasi tersebut terhimpun dalam tiga federasi yaitu; Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO berdiri tanggal 13 September 1951), Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO, berdiri tahun 1954) dan Persatuan Kepramukaan Putri Indonesia (PKPI).

Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Pada tanggal 10-20 Agustus 1955 IPINDO juga berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional I di Pasar Minggu Jakarta. Sedangkan POPPINDO dan PKPI pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell (istri Baden Powell) ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia. Pada tahun 1959, PKPI mengadakan perkemahan besar untuk pramuka putri yang disebut "Desa Semanggi" di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingen ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.

Menyadari kelemahan yang ada, ketiga federasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan Kepramukaan Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid sehingga coba dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pionir Muda seperti di negara komunis

lainnya. Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban organisasi kepramukaan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan Pramuka.

Kamis malam tanggal 9 Maret 1961 Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepramukaan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepramukaan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut **Pramuka**. Presiden juga menunjuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kursus Mahir Dasar (KMD)

Tenaga Kebudayaan dalam kepramukaan dapat diartikan sebagai aparaturnya yang bertugas mengelola aset kebudayaan sesuai dengan fungsinya yang menjadi



anggota dewasa dalam gerakan pramuka, sedangkan pendidik dalam kepramukaan adalah anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka, yang mempunyai tugas berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Anggota dewasa diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Pelatihan anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka sesuai profesinya yang diselenggarakan dalam bentuk kursus/pelatihan, dan pertemuan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dasar dan pengalaman praktis sebagai bekal untuk membina peserta didik, mengelola Gugus Depan dan mengelola pangkalan saka sebagai tempat belajar dan berlatih.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk membekali anggota dewasa sebagai kader Gerakan Pramuka melalui berbagai kemampuan agar dapat berperanserta bagi tercapainya tujuan Gerakan Pramuka. Sistem Pendidikan dan Pelatihan dalam Gerakan Pramuka selanjutnya disebut Sisdiklat. Tujuan Sisdiklat adalah memberi pedoman bagi kwartir dan satuan Gerakan Pramuka dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan, agar dapat melaksanakan perannya di lingkungan Gerakan Pramuka.

Jenis kegiatan pelatihan dan pertemuan bagi anggota Gerakan Pramuka usia dewasa adalah kursus.

Kursus Pembina Pramuka Mahir adalah kursus bagi anggota dewasa agar dapat membina peserta didik. Kursus Pembina Pramuka Mahir terdiri atas 2 (dua) jenjang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jenjang pertama kursus bagi pembina, yaitu Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD). KMD diselenggarakan bagi anggota dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di Gugus Depan. Anggota dewasa Gerakan Pramuka yang telah mengikuti KMD, selanjutnya harus mengikuti Narakarya I, yang merupakan masa pengembangan bagi lulusan KMD, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan Surat Hak Bina (SHB).

Jenjang kedua kursus bagi pembina, yaitu Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML). Seseorang dapat mengikuti KML dengan persyaratan telah menyelesaikan masa Narakarya 1 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan. Bagi pembina yang telah selesai mengikuti KML, diharuskan mengikuti Narakarya II, yang merupakan masa pematapan bagi lulusan KML. Selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan SHB, yang merupakan pembaharuan sesuai golongan kemahiran.

Peserta kegiatan KMD terdiri dari guru sejarah di DKI, 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)tenaga

Kiprah



kebudayaan (tenaga kebudayaan di unit kebudayaan dan guru bidang budaya di sekolah). Dari unit kerja kebudayaan yang ikut terdiri dari 11 (sebelas) Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 12 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Pusat Penelitian dan Kebijakan Kemdikbud, Museum Khusus, Museum Mandiri, Galeri Nasional, Setditjen Kebudayaan dan Direktorat Sejarah yang seluruhnya berjumlah 81 orang.

Materi selama 6 hari yaitu diberikan tiga hari di dalam kelas dan tiga hari di luar kelas. Untuk materi praktek Keterampilan Kepramukaan (*Scouting Skill*) para peserta antara lain diajarkan pembuatan gapura perkemahan, menara pandang, jembatan penyebrangan, tandu, tiang bendera dll. selain itu praktik Upacara, praktik berkemah, dan praktik penjelajahan.

Kegiatan KMD dibuka pada 13 Maret 2017, pukul 13.30 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Pusdiklatnas) oleh Ketua Umum/Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti Kak Dr. Harris Iskandar. Pada pembukaan ini selain seluruh peserta, narasumber dan panitia, hadir pula Direktur Sejarah merangkap Koordinator Krida Sejarah Kak Triana Wulandari.

Dalam ketua panitia, Kak Triana Wulandari, menyampaikan bahwa kegiatan yang diikuti 81 orang peserta ini bertujuan untuk pembentukan Pembina Saka WBB mahir, sehingga kebutuhan akan kurangnya Pembina Saka WBB dapat terpenuhi. Selanjutnya dalam paparan Kapin Saka WBB, Dr. Harris Iskandar di sampaikan fungsi ke pramukaan di dunia dan ciri khas Indonesia. Dalam kepramukaan di Indonesia berisi pembelajaran langsung tentang nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Setelah pembukaan, diisi dengan dinamika kelompok yang disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Suyatno, Kapusdiklatnas Gerakan Pramuka, yang isinya sebagai pengantar tentang apa saja yang akan dilakukan



dalam KMD dengan para pengajar profesional dari Pusdiklatnas. Selanjutnya ditutup dengan pre test dan kontrak belajar.

Di hari kedua, pemberian materi diisi dengan materi Fundamental Gerakan Pramuka (Kebijakan, UU GP, AD ART, Motto & Kiasan Dasar) oleh Kak Susi dari Kwarnas. Regulasi tentang kepramukaan khususnya di Indonesia. Menurut sejarahnya, pada awal dibentuknya tujuan kepramukaan adalah untuk mendukung perjuangan Indonesia merdeka dan kemudian digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepramukaan dalam sejarahnya muncul

Dasar inilah yang melahirkan tiga dimensi dalam Pramuka, gerakan, pendidikan dan metode pembelajaran yang biasa dikenal dengan Pramuka. Akhirnya Kak Susi menyampaikan penekanan bahwa pramuka menciptakan karakter kemandirian, keteladanan dan kemampuan melakukan perubahan sebagai bekal hidup bahagia. Harapannya kepada peserta KMD supaya mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang diterima.

Hari ketiga kegiatan diisi dengan materi Postur Peserta Didik Penegak, yang membahas tentang bagaimana membang-kitkan jiwa peserta didik penegak, bedanya dengan penggalang dan siaga, kegiatan yang menarik dan menantang pada tingkat penegak dan fungsi Dewan Satuan dalam pramuka penegak. Setelah itu peserta di berikan materi di lapangan bagaimana bentuk-bentuk Keterampilan Kepramukaan (*scouting skills*) seperti pembuatan tandu dengan menggunakan keterampilan tali temali, teknik pertolongan pertama pada kecelakaan, juga cara pembuatan bivak (tenda sederhana) dan terakhir adalah materi tentang bagaimana mengelola administrasi pada satuan penegak. Dalam kegiatan ini peserta dibagi atas dua kelas besar, diberi nama Sudirman dan Agus Salim. Tiap kelas dibagi



atas 5 kelompok sangga, dan tiap sangga memiliki pelatih pendamping yang mengontrol dan memberikan bimbingan langsung selama pelatihan. Setiap hari di akhir materi dilakukan pertemuan dengan pelatih pendamping, dimana tiap peserta diberi kesempatan menyampaikan apa yang didapat dan apa yang dirasakan.

Di hari keempat, seperti kebiasaan setiap harinya dimulai dengan kegiatan sholat subuh bersama bagi yang beragama Islam di Masjid Pusdiklatnas Pramuka Cibubur, yang dilengkapi dengan tugasnya salah satu dari peserta untuk memberikan ceramah agama "kultum" subuh. Setelah itu dilanjutkan dengan senam bersama di lapangan. Di hari keempat ini diisi dengan *outdoor games*, *Project Works* atau *Pioneering Aplikatif*, SKU, SKK dan SPG serta prosesi pelantikan. Di hari ke empat ini dimulai kegiatan diluar ruangan atau di tenda. Masing-masing sangga bersama membuat tenda, merakitnya menjadi tempat yang layak untuk ditempati sambil mengikuti acara yang disiapkan pelatih.

Pada hari kelima, peserta diajak melakukan praktek membina penegak dengan diberikan projek sendiri-sendiri misalnya, tiap peserta KMD diharuskan mampu memberikan informasi, menyampaikan teknik sesuai tema *project works* yang diberikan (ditentukan dengan cara acak, bukan pilihan) seperti bagaimana menjelaskan menjadikan barang bekas menjadi berguna kembali dengan teman dari sangga lain.

Selain itu para peserta juga diajarkan bagaimana membina keterampilan baris berbaris, kecakapan *snapore*, penggunaan sandi dalam pramuka, dan lain-lain. Kegiatan ini didampingi dan dinilai langsung oleh pelatih tiap sangga. Setelah itu diadakan simulasi pelaksanaan kegiatan penegak dalam bentuk upacara, dalam dua formasi, formasi Pembina siap menjadi



Pembina upacara dan Pembina tidak bersedia memimpin upacara.

Di hari ke enam, dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan ke tempat bersejarah Museum Sumpah Pemuda dan Museum Mandiri. Saka Widya Budaya Bakti adalah satuan karyayang mengusung pendidikan dan kebudayaan sebagai konten yang disampaikan melalui kepramukaan. Dari kunjungan ini peserta diharapkan bisa mengetahui sejarah perjuangan bangsa, dan diharapkan akan memotivasi yang lain untuk menjadikannya sebagai tempat belajar dan berlatih bidang kebudayaan.

Malam harinya sebelum acara Api Unggun, dilakukan tes akhir. Selanjutnya dilakukan upacara penutupan, dipimpin oleh Direktur Sejarah, mewakili Pinsaka Widya Budaya Bakti. Dalam arahnya mengapresiasi peserta yang sudah berhasil bertahan dari hari pertama sampai akhir. Dengan harapan bahwa lulusan KMD ini nantinya benar-benar menjadi triger di tempat masing-masing untuk pengembangan Saka Widya Budaya Bakti, setidaknya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa yang terkandung dalam Dasa Dharma Pramuka.

Kegiatan KMD yang diperuntukkan untuk calon Pembina Saka Widya Budaya Bakti ini yang diikuti oleh para pengelola budaya baik dari pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah serta guru ini, menghasilkan 81 lulusan yang siap berbakti kembali di unit masing-masing dengan memikul tugas narakarya satu, yaitu berkoordinasi dan melapor pada kwartir terdekat masing-masing sesuai domisili. Akhirnya dengan selesainya kegiatan KMD ini, melahirkan para Pembina yang terampil dan berkarakter, dengan semboyan Ikhlas Bhakti, Bina bangsa Berbudi Bawalaksana. ●

Bantuan Pemerintah Fasilitas Komunitas Kesejarahan Tahun 2017

Fasilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah melalui berbagai kegiatan, melalui tangan komunitas dan penggiat sejarah kesadaran ini akan lebih menggeliat dan meresap, mengalir ke seluruh masyarakat Indonesia.

Penanaman nilai-nilai sejarah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Kita tidak dapat menafikan bahwa banyak pihak ikut ambil bagian dalam menggali, menjaga, dan mengapresiasi sejarah di Indonesia. Beragam aktivitas sejarawan, budayawan, organisasi profesi sejarah, komunitas sejarah, dan masyarakat umum telah mengembangkan sejarah Indonesia. Untuk itu pemerintah sebagai fasilitator dan regulator perlu mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Beberapa bentuk apresiasi sejarah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan dukungan terhadap setiap aktivitas kesejarahan, diantaranya memfasilitasi berbagai kegiatan kesejarahan yang dilakukan sejarawan, budayawan, organisasi profesi, komunitas dan masyarakat.

Tidak sedikit komunitas sejarah yang ada saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Para pegiat di komunitas sejarah memiliki idealisme dan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan pengembangan sejarah, akan tetapi di sisi lain, terbentur dengan





berbagai permasalahan menyangkut legalitas, keterbatasan sarana dan prasarana. Atas dasar itulah diadakan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Kesenjangan Tahun 2017.

Berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikator pada 23-25 Maret 2017, sesuai dengan tema dan persyaratan yang ditentukan panitia, serta hasil penilaian verifikator maka proposal yang lolos ada sebanyak 87 proposal.

Rekapitulasi Hasil Lolos Verifikasi Fasilitasi Komunitas Kesenjangan:

| NO. | JENIS BANTUAN | JUMLAH KOMUNITAS |
|--------------|--|------------------|
| 1. | FASILITASI PEMBUATAN FILM SEJARAH | 15 |
| 2. | FASILITASI EVENT KESEJARAHAN | 29 |
| 3. | FASILITASI PENGEMBANGAN APLIKASI KESEJARAHAN | 11 |
| 4. | FASILITASI PENULISAN SEJARAH LOKAL UNTUK GURU SEJARAH (MGMP) | 12 |
| 5. | FASILITASI PENULISAN SEJARAH | 20 |
| TOTAL | | 87 |

Kegiatan Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah di hadir oleh 126 orang undangan, terdiri dari peserta calon penerima Banpem, narasumber, dan panitia pada 4-7 Juni 2017 di Ambhara Hotel Blok M Jakarta.

Acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan dari Direktur Sejarah, Sambutan dan Pembukaan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, serta ditutup dengan pembacaan doa.

Direktur Sejarah dalam laporannya mengatakan Fasilitasi ini baru berlangsung tahun ini, karena tahun-tahun sebelumnya berbentuk bantuan untuk Rumah Budaya. Tahun ini Direktorat Sejarah berusaha menggeliatkan kegiatan melalui film, event, penulisan, dan aplikasi sejarah.

Tujuan Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah melakukan fasilitasi ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sejarah melalui berbagai kegiatan, melalui tangan komunitas dan penggiat sejarah kesadaran ini akan lebih menggeliat dan meresap, mengalir ke seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah komunitas sejarah. Kami sangat menunggu ide dan karya, yang kemudian dapat kembali lagi ke kami, dapat kami gandakan dan kembalikan ke masyarakat, misalnya penulisan buku tentang sejarah lokal.

Diharapkan seluruh penerima dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaiknya, karena ini bukan sekedar pemerintah memberikan uang tapi ada pertanggungjawaban dan resiprositas yang jelas.

Dalam Pembukaannya Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Hilmar Farid mengatakan bahwa bantuan kesenjangan memang baru, sebelumnya bentuk bantuannya adalah Rumah Budaya Nusantara (RBN).

“Tahun ini fasilitasnya untuk komunitas, mengapa komunitas?” Karena sejarah memang hidup di komunitas, dan pemerintah sebagai fasilitator, yang fungsinya untuk memudahkan (fasilitasi) pengembangan kesadaran sejarah.

Kegiatan ini menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Daryanto yang membahas mengenai Program dan Akuntabilitas Laporan Pelaksanaan Bantuan Komunitas; Inspektur I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Karyaningsih yang memberi paparan terkait Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dan Monitoring; Perwakilan Kantor Pajak yang memberi materi Ketentuan Perpajakan Dalam Fasilitasi Bantuan Pemerintah; serta Perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengisi materi mengenai Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Biro Hukum.

Sosialisasi Bantuan Pemerintah Fasilitasi Komunitas Kesenjangan dilanjutkan dengan pembagian jenis fasilitasi sesuai jenis bantuannya. Diadakan sidang komisi masing-masing koordinator dari berbagai fasilitasi, kemudian dilanjutkan dengan MoU di depan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Verifikator.

Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah ditutup oleh Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Nono Adya Supriyatno. Dalam penutupannya beliau mengatakan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Kebudayaan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 untuk Pemajuan Kebudayaan. ●

Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejarahan Bagi Penulis Sejarah

Kegiatan Workshop ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis sejarah, khususnya penulis sejarah yang tidak berlatarbelakang pendidikan sejarah dan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga penulis sejarah yang dapat menulis sejarah sesuai dengan metodologi penulisan sejarah yang benar.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan atau Tenaga Kebudayaan merupakan faktor utama pembangunan suatu bangsa sebagai asset yang mempunyai peranan strategis khususnya sebagai pelestari nilai-nilai dan warisan budaya Indonesia yang profesional.

Selain itu, kualitas manusia ditentukan oleh ketangguhan budaya, sehingga pembangunan manusia pada dasarnya adalah pembangunan akhlak dan perilaku budaya yang mendukung kemajuan bangsa. Untuk itulah peningkatan kualitas tenaga di bidang kebudayaan sangat diperlukan.

Untuk meraih dan menangkap peluang yang ada, pengembangan tenaga kebudayaan harus diutamakan pada tiga pilar yang dibutuhkan di era globalisasi, yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional yang berdaya saing tinggi baik pada level nasional maupun internasional

Untuk mewujudkan tenaga kebudayaan sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diperlukan

berbagai kebijakan yang terarah, terencana, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, salah satunya dan yang paling penting adalah dengan meningkatkan kompetensi para pelaku bidang kebudayaan.

Para pelaku bidang kebudayaan, yang mana salah satunya adalah Tenaga Kesejarahan, khususnya penulis yang dianggap mempunyai kekuatan modal insan (human capital) yaitu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan melahirkan inovasi menulis sejarah, khususnya tenaga sejarah/ peminat sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah.

Sektor ini perlu terus dikembangkan dan diberdayakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan pembangunan bidang kebudayaan, khususnya tulisan sejarah yang sesuai dengan kriteria metodologi penulisan sejarah yang benar.

Mereka ini berada di kantong-kantong potensi ekosistem kebudayaan yang masih kurang tersentuh yang harus ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi



dan kemampuan teknisnya agar Tenaga Kesejarahan itu benar-benar dapat diandalkan.

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejarahan bagi Penulis Sejarah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis sejarah khususnya penulis sejarah yang tidak berlatarbelakang pendidikan sejarah dan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga penulis sejarah yang dapat menulis sejarah sesuai dengan metodologi penulisan sejarah yang benar.

Saat ini banyak buku-buku atau karya tulis lainnya mengenai sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang tidak berlatarbelakang pendidikan sejarah. Hal ini bukan sesuatu yang salah, namun demikian seringkali tulisan-tulisan tersebut tidak sesuai dengan metodologi penulisan sejarah. Untuk itu diperlukan adanya workshop sebagai pembekalan bagi para penulis tersebut.

Adapun tujuan dilaksanakan Workshop yaitu:

1. Melahirkan penulis sejarah yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah menjadi penulis yang profesional sesuai standar kompetensi;
2. Menginventarisasi tenaga kesejarahan yang berprofesi sebagai penulis sejarah yang ada di aparaturnya dan masyarakat.
3. Menguatkan fungsi tenaga kesejarahan dalam jaringan ekosistem pelestarian kesadaran sejarah di

masyarakat.

Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejarahan bagi Penulis Sejarah dilaksanakan tanggal 28 Februari-3 Maret 2017, dan pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan di 4 lokasi yaitu; Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya yang mana di tiap-tiap lokasi diikuti 50 orang peserta.

Peserta Workshop terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan ada yang berpendidikan Antropologi, Arkeologi, Hubungan Internasional, Komunikasi, Teknologi Pertanian, Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Luar Biasa, Ilmu Pemerintahan, Psikologi, Teknologi Pendidikan, Manajemen Transportasi Udara, Seni Pedalangan, Ilmu Perpustakaan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Biologi dll, dan juga dengan berbagai macam profesi, ada yang berprofesi sebagai guru, dosen, Widyaiswara, mahasiswa, peneliti, pemandu, verifikator, wartawan, ibu rumah tangga, pustakawan, editor, web developer dsb.

Agar Workshop bagi penulis sejarah dapat dilaksanakan secara terstruktur, terstandar dan terukur, maka perlu dipersiapkan modul, pengajar yang kompeten di bidangnya, tempat pelaksanaan yang representatif, sarana dan prasarana yang memadai, serta eksekusi ke bangunan-bangunan bersejarah.

Adapun mata ajar yang disampaikan dalam workshop antara lain Pengantar Ilmu Sejarah, Metode Sejarah, Sejarah Lokal, Penulisan Sejarah dan Bahasa

Kiprah



Indonesia dan disampaikan oleh pengajar dari Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga serta dari Balai Bahasa.

Selama mengikuti workshop, ada penilaian bagi peserta yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan juga sikap.

Untuk menambah wawasan dan juga pemahaman peserta bagaimana menuangkan konten sejarah dalam berbagai sudut pandang dalam tulisan sejarah, proses belajar mengajar tidak hanya berlangsung di dalam ruangan (in door) akan tetapi juga dilaksanakan di luar ruangan (out door).

Selama 2 hari peserta dibekali secara teori oleh para pengajar di dalam kelas dan di hari ke-3 peserta diajak ekskursi mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah yaitu untuk pelaksanaan workshop di Jakarta, ekskursi ke Kawasan Pecinan Petak 9, kemudian berkunjung ke Vihara Dharma Bakti,

Dan dari Vihara Darma Bakti perjalanan dilanjutkan ke Gereja Santa Maria De Fatima, sebuah gereja Katolik dengan arsitektur Tionghoa, Gereja yang terletak di jalan Kemenangan III/47 Glodok, Jakarta Barat ini merupakan gereja tertua di Jakarta.

Setelah dari Gereja Santa Maria De Fatima perjalanan dilanjutkan menyusuri Kawasan Toko Tiga, Pintu Kecil,

Kali Besar Timur hingga ke Museum Bank Indonesia yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara no.3 Jakarta Barat.

Usai dari Museum Bank Indonesia perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Museum Sejarah Jakarta atau dikenal dengan Museum Fatahilah. Museum Fatahilah terletak di Jalan Fatahilah No. 1 Jakarta. Bangunan ini dahulu sebagai Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 -1712 atas perintah Gubernur Jenderal

Joan Van Hoorn, kemudian diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Jenderal Abraham Riebeeck sejak 10 Juli 1710. Tahun 1937, Yayasan Batavia Oud mengajukan pendirian museum sebagai Museum Sejarah Batavia. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1939. Tanggal 30 Maret 1974 Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung ini sebagai Museum Sejarah Jakarta.

Pelaksanaan Workshop di Bandung, di hari ke-3 setelah sarapan pagi pukul 08.00 WIB, peserta diajak ekskursi ke Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

Di dalam museum tersebut terdapat koleksi bendera, foto, video, auditorium tempat bersidang serta naskah hasil dari rapat-rapat para Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Afrika. Dengan mengunjungi Museum KAA

peserta diharapkan mengetahui bahwa Bandung pada saat itu mampu menggelar event besar dengan sarana dan prasarana yang memadai. KAA sendiri merupakan pernyataan sikap dari Republik Indonesia yang memilih netral atau non blok dalam menyikapi politik luar negeri yang pada saat itu terdiri dari blok barat dan blok timur.

Selanjutnya peserta bertolak menuju ke Penjara Banceuy dengan harapan peserta mengetahui tentang sejarah Indonesia pada masa pergerakan, khususnya perjalanan hidup Sukarno pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Museum Wangsit Mandala Siliwangi Peserta berpose di Museum KAA yang berlokasi di Jalan Lembong. Museum ini merupakan bekas markas militer divisi Siliwangi pertama di Bandung tahun 1910.

Pelaksanaan workshop di Yogyakarta, ekskursi dilaksanakan ke Pabrik Gula Madukismo (PGPS Madubar, Madukismo), Taman Sari, Kraton Kasultanan dan Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya tempat berlangsungnya Kongres Perempuan I.

Pukul 06.30 WIB peserta berangkat dari hotel dan tiba pukul 07.30 di Pabrik Gula Madukismo. Peserta diterima pihak Pabrik Gula di ruang pertemuan PGPS Madubar, dengan acara tatap muka, penjelasan singkat dan pemutaran video tentang proses produksi pembuatan gula dan spiritus serta sesi tanya jawab.

Setelah selesai acara tatap muka di ruang pertemuan PGPS, peserta diajak menuju ke ruang produksi dengan menaiki kereta Agrowisata Madukismo tempat di mana terdapat mesin-mesin dan alat berat untuk memproduksi gula dan spiritus.

Setelah dari PGPS. Madukismo perjalanan peserta dilanjutkan menuju ke Tamansari. Taman Sari merupakan salah satu cagar budaya di Yogyakarta yang telah menjadi tempat wisata populer di kota ini. Bangunan yang mempunyai luas 10 hektar ini mempunyai 4 kompleks yaitu danau buatan yang terletak di sebelah barat, pemandian Umbul Binangun terletak di sebelah selatan danau buatan, Pasarean Ledok Sari dan Kolam Garjitawati terletak di sebelah selatan Umbul Binangun, bagian sebelah timur yang memanjang dari pemandian Umbul Binangun sampai pasarean Ledok sari dan Kolam Garjitawati, merupakan danau dengan pulau buatan serta jembatan gantung dan kanal

Setelah dari Taman Sari peserta melanjutkan perjalanan ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Peserta masuk ke dalam keraton melalui regol Sri Manganti (pintu gerbang (regol) menuju Bangsal Srimanganti. Bangunan Keraton dengan arsitektur jawa yang agung dan elegan ini terletak di pusat kota Yogyakarta. Bangunan ini didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755.



Kiprah



Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan museum hidup dan menjadi pusat perkembangan kebudayaan Jawa.

Ekskursi dilanjutkan ke Gedung Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Gedung tersebut terletak di Jalan Brigjen Katamsno 139 Yogyakarta. Dalem Jayadipuran merupakan sebuah bangunan rumah klasik yang berbentuk limasan. Pada mulanya rumah ini bernama Dalem Dipowinatan sesuai dengan nama pemiliknya KRT. Dipowinoto. Setelah KRT Dipowinoto meninggal, bangunan rumah ini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke VII kemudian dihadiahkan kepada menantunya yang bernama KRT.Jayadipura, beliau dikenal sebagai arsitek bangunan dan seniman serba bisa dan sejak saat itu bangunan rumah tersebut terkenal dengan nama Dalem Jayadipuran. Setelah terjadi pergantian kepemilikan dan penghuni, untuk saat ini bangunan tersebut menjadi milik Direktorat Jenderal Kebudayaan yang difungsikan sebagai Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.

Pada masa pergerakan nasional, Dalem Jayadipuran mempunyai peranan yang sangat penting antara lain:

- Tanggal 29 Mei-3 Juni 1919 sebagai tempat Kongres Jong Java I

- Tanggal 23-27 Mei 1923 sebagai tempat Kongres Jong Java II
- Tanggal 22-25 Desember 1928 sebagai tempat Kongres Perempuan Indonesia I.

Pelaksanaan workshop di Surabaya peserta diajak ekskursi ke rumah sederhana yang berada di sebuah gang di Peneleh, yaitu rumah HOS Cokroaminoto. Tokoh nasionalis yang berkecimpung di dunia politik dan dikenal sebagai muassis atau pentolan organisasi politik, Sarikat Islam.

Kemudian peserta dibawa ke Tugu Pahlawan sebuah monumen yang menjadi markah tanah Kota Surabaya. Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Suroboyo berjuang melawan pasukan Sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia.

Setelah dari Tugu Pahlawan peserta dibawa ke Rumah Abu Han. Rumah ini bukan tempat menyimpan abu jenazah seperti yang disangkakan banyak orang, melainkan tempat ini sebagai persembayangan keluarga Han dari generasi ke generasi.

Kemudian ekskursi dilanjutkan ke rumah WR.



Supratman, pahlawan nasional yang semua orang pasti tahu, bahwa beliau adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rumah WR.Supratman terletak di jalan Mangga Tambaksari Surabaya.

Dan obyek eksekursi yang terakhir yaitu Hotel Oranje Surabaya (Hotel Majapahit). Sebuah hotel mewah bersejarah di Jalan Tunjungan, Surabaya. Dahulu hotel ini bernama LMS, lalu berganti nama menjadi Hotel Oranje kemudian berganti nama lagi menjadi Hotel Yamato dan juga Hotel Hotoero.

Hotel Majapahit dibangun tahun 1910 oleh Sarkies Bersaudara dari Armenia dan saat ini sudah berubah menjadi hotel mewah berbintang lima.

Salah satu momen penting yang terjadi di hotel ini terjadi pada tanggal 19 September 1945 yakni insiden Bendera. Peristiwa bermula ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin Mr. Plugman mengibarkan bendera Merah Putih Biru di puncak sebelah kanan hotel. Para penjuang melakukan perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berwarna merah, putih dan biru, dengan demikian bendera itu menjadi merah putih yaitu bendera Republik Indonesia.

Selesai eksekursi peserta kembali ke hotel untuk

menyiapkan laporan hasil eksekursi yang akan dipresentasikan secara kelompok pada malam harinya. Pada umumnya setiap kelompok berhasil menyampaikan paparannya dengan baik. Di hari ke-4 yang merupakan hari terakhir, pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis Bidang Kesejarahan bagi penulis Sejarah ditutup dengan harapan setelah mengikuti workshop ini, peserta dapat menulis sejarah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah secara baik dan benar. ●



Kegiatan Internalisasi Nilai Kebangsaan di Wilayah Perbatasan

Memahami Indonesia dari Perbatasan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong para guru untuk peduli terhadap permasalahan di perbatasan khususnya pendidikan dan meningkatkan peran guru sebagai agen perubahan (*agent of change*)





Kegiatan Internalisasi Nilai Kebangsaan di Wilayah Perbatasan adalah kegiatan penginternalisasian nilai kebangsaan kepada guru Sejarah SMA/SMK/MA/Sederajat dan Guru IPS SMP/Sederajat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong para guru untuk peduli terhadap permasalahan di perbatasan khususnya pendidikan. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru tentang dinamika masyarakat di daerah perbatasan, baik secara geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Meningkatkan peran guru sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk membangun jiwa dan semangat nasionalisme generasi muda (anak didik) untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI. Sebagai forum tukar pikiran tentang materi dan pembelajaran sejarah dalam kaitan penanaman nilai kebangsaan di wilayah perbatasan.

Para guru dibagi dalam beberapa kelompok dan melakukan observasi di beberapa tempat di perbatasan, kemudian berdiskusi dan menyajikan dalam sebuah presentasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana kondisi perbatasan dilihat dari sudut pandang baik dari guru-guru di perbatasan maupun guru-guru di luar daerah perbatasan.

Meningkatkan wawasan para guru tentang dinamika masyarakat di daerah perbatasan, secara geografis, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Kegiatan ini berlangsung pada 16 s.d 21 April 2017 bertempat di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pembukaan dilaksanakan pada 16 April 2017 pukul 20.00 WIB di Gedung Maharatu Kabupaten Siak oleh Bupati Siak. Acara pembukaan dikemas dalam rangkaian budaya Melayu. Aktivitas peserta di Kabupaten Siak adalah diskusi kebudayaan Melayu dengan menghadirkan beberapa tokoh budaya Melayu, mengunjungi: sekolah, tempat besejarah, tempat aktivitas ekonomi dan budaya di Kabupaten Siak. Hal yang menarik dari Siak adalah kentalnya pendidikan budaya Melayu yang ditanamkan di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk menanamkan pemahaman identitas budaya kepada para siswa, sehingga pada saatnya mereka muncul sebagai pribadi yang memahami akarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di Kabupaten Bengkalis. Para peserta mengikuti Dialog Perbatasan yang menghadirkan Dalanal Dumai, Kepala Imigrasi Bengkalis, Tokoh Pendidik Bengkalis, dan guru perbatasan. Bengkalis menghadapi berbagai tantangan khas perbatasan terutama masalah pelintas batas. Sebagai wilayah Indonesia yang berhadapan laut dengan Malaysia masalah perbatasan

Kiprah



tidak bisa dihindari. Siak-Bengkalis dan Malaysia dalam hal ini Johor dan Malaka dipisahkan oleh batas-batas negara. Tetapi diikat oleh sejarah dan budaya Melayu atau yang disebut sebagai Dunia Melayu Dunia Islam. Oleh karena itu meskipun merupakan wilayah perbatasan tidak dapat diambil garis tegas pembeda budaya. Keduanya saling terhubung. Dengan semangat ini hubungan Bengkalis sebagai perbatasan dengan Malaysia adalah hubungan kekeluargaan yang dijaga agar tetap harmonis. Paradigma

bahwa negara tetangga adalah 'seteru' perlahan-lahan harus diubah menjadi pendekatan dua sahabat yang saling menghormati kedaulatan masing-masing.

Peserta kemudian melakukan observasi ke sekolah-sekolah dan kunjungan ke tempat peninggalan sejarah seperti makam Laksamana Raja di Laut, museum, dan tempat bersejarah lainnya. Hasil dari observasi kemudian dipresentasikan untuk didiskusikan antar kelompok.





Para peserta kemudian membuat rekomendasi yang diserahkan kepada Bupati Siak dan Bengkalis pada saat penutupan. Isi rekomendasi antara lain perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan pemahaman pendidikan karakter. Penutupan dilakukan pada 19 April 2017 di Pendopo Kabupaten Bengkalis. Direktorat Sejarah dalam kegiatan ini juga memberikan apresiasi kepada guru berdedikasi di perbatasan yang telah mengabdikan diri mengajar siswa di perbatasan.

Siak dan Bengkalis berdasarkan sejarahnya telah mencatatkan diri sebagai pendukung NKRI. Sultan Siak terakhir adalah Sultan Syarif Kasim II, Bangsa Indonesia mengenalnya sebagai Pahlawan Nasional. Pada bidang pendidikan, Sultan bersama Permasuri Syarifah Latifa atau Tengku Agung mendirikan sekolah Latifa yang diperuntukan bagi anak-anak Siak. Selain itu juga mendirikan beberapa sekolah untuk anak-anak perempuan dan sekolah agama. Sultan Syarif Kasim II dikenal sebagai negarawan yang melepaskan takhta dan kekayaan Kesultanan Siak untuk diserahkan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Selain itu Sultan memberikan bantuan kepada Republik sebesar f. 13.000.000,-. Atas sikapnya ini, Belanda mengambil tindakan represif kepada Sultan, yang mengakibatkan Sultan Syarif Kasim II terpaksa meninggalkan kerajaan menuju Aceh. Beliau tutup usia pada 23 April 1968,

kemudian dimakamkan di depan Istana Assyerayyah Al Hasyimiah sebelah Masjid Shahabuddin. Sultan Syarif Kasim II beserta rakyat Siak mendukung berdirinya NKRI dan menyatakan peleburan diri ke dalamnya.

Rakyat Bengkalis setelah proklamasi, segera menyatakan sikap menjadi bagian dari Indonesia. Peristiwa Pengibaran bendera 17 Oktober 1945 menjadi salah satu bukti kesetiaan rakyat Bengkalis terhadap Bangsa dan Negara Indonesia. Para pemuda dan masyarakat bersatu melawan ancaman tentara Belanda dengan mengibarkan Sang Merah Putih. Sejak negara ini baru berdiri, rasa patriotisme dan nasionalisme telah tumbuh dalam hati sanubari masyarakat Siak dan Bengkalis, sehingga menyatakan kesetiaan terhadap NKRI. Nilai inilah yang seharusnya terus-menerus dipupuk terhadap generasi muda. Oleh karena itu kegiatan Internalisasi Nilai Kebangsaan di Wilayah Perbatasan ini merupakan ajang para guru sejarah SMA dan guru IPS SMP dari seluruh Indonesia untuk mempelajari wilayah perbatasan yang memiliki kekayaan sejarah dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu mempelajari dan saling tukar menukar pengetahuan antar sesama guru mengenai sejarah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. ●

Pameran Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Ekspresi Batik

Menyuguhkan Sejarah
Secara Lebih Artistik dan Menarik

Pameran Sejarah: “Visualisasi Ekspresi Pahlawan Dan Tokoh Perempuan” Eksplorasi Teknik Gutha Tamarin dalam Media Kain Sutra dilaksanakan pada 7 s.d. 21 Agustus 2017 di Gedung C, Galeri Nasional Indonesia. Pameran ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komunitas 22 Ibu, dan Galeri Nasional Indonesia. Kegiatan

ini merupakan bagian dari Program Gerakan Cinta Tanah Air (GENTA) yang digagas oleh Direktorat Sejarah.

Pameran ini memiliki beberapa keunikan, *pertama*, selain lukisan, Direktorat Sejarah juga menerbitkan buku “Pahlawan dan Tokoh Perempuan dalam Bingkai Kebinekaan”. *Kedua*, para pahlawan dan tokoh perempuan dilukis di atas kain sutra, menggunakan teknik gutha tamarin. Teknik ini merupakan teknik membuat





menggunakan perintang gutha yang berasal dari bubuk biji tamarin atau biji buah asam. *Ketiga*, para pelukis yang berjumlah 34 orang adalah para perempuan seniman, dosen seni, dan guru seni dari Bandung dan sekitarnya.

Tujuan dari pameran ini adalah menyuguhkan sejarah secara lebih artistik dan menarik. Para pengunjung disuguhkan oleh lukisan-lukisan tokoh sekaligus diajak memahami sejarah para tokoh melalui buku yang diterbitkan. Menenal pahlawan adalah bagian dari upaya mengenal diri sendiri dan sejarahnya. Pameran ini penting sebagai bagian dari Pendidikan Karakter untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan cinta tanah air.

Pahlawan dan tokoh perempuan Indonesia diekspresikan dalam visual karya seni dengan teknik Gutha Tamarin. Ada 12 Pahlawan Perempuan, 16 Tokoh Pejuang Pergerakan Indonesia, dan 6 tokoh teladan perempuan yang dinilai bisa memberi inspirasi kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah suatu sinergi unsur kebudayaan yaitu unsur ilmu pengetahuan, sejarah, unsur kesenian, yaitu seni rupa melalui teknologi melukis batik.

Rangkaian pameran ini dibuka secara resmi pada senin, 7 Agustus 2017 oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Para undangan yang hadir diantaranya Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suryan Widati Muhajir Effendy Ketua Dharma Wanita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Walikota Salatiga, perwakilan kementerian dan lembaga negara, Eselon 2 dan 3 Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah, para peminat seni, guru-guru Sejarah yang tergabung dalam MGMP Sejarah, komunitas sejarah, dan pelajar.

Ibu Mufida menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Ia menyambut baik dan menghargai Direktorat Sejarah yang telah berinisiatif menawarkan pameran sebagai proses pembelajaran sejarah melalui wujud kesenian. Perempuan berperan dan berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mereka mampu berkiprah dan bersaing



dengan bangsa lain di dunia.

Ibu Mufidah didampingi oleh Ibu Suryan Widati Muhajir Effendi, Ibu Triana Wulandari, Direktur Sejarah, dan Ibu Nuning Damayanti, perwakilan dari para perupa, menggoreskan pasta gutha tamarin pada kain sutra sebagai tanda bahwa acara secara resmi telah dibuka. Kemudian acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu nasional dan lagu *medley* daerah yang dibawakan oleh pemain biola muda, Sigit Arditya. Acara dilanjutkan dengan kunjungan Ibu Mufida Kalla, didampingi oleh Ibu Suryan Widati Muhajir Effendy, Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Hilmar Farid, Ibu Triana Wulandari, serta para pelukis yang terlibat, melakukan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Rombongan kemudian melakukan peninjauan di ruang pameran untuk menikmati lukisan-lukisan yang dipamerkan dipandu oleh kurator pameran Citra Smara Dewi

Direktorat sejarah juga menyelenggarakan *workshop* Eksploitasi Teknik Gutha Tamarin untuk membuat pada 8 s.d. 9 Agustus 2017, di Ruang Serba Guna, Galeri Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh sekira 200 pelajar, mahasiswa, guru, dan masyarakat umum. Para peserta diajak membuat dengan perintang gutha tamarin menggantikan lilin batik. Teknik gutha tamarin ini dipandang lebih aman karena bersifat dingin sehingga tidak membahayakan bagi anak-anak sekalipun. Para peserta menggambar berbagai objek yang dipilih di atas kain sutra yang telah disiapkan, kemudian membuat, setelah kering diberi warna dengan cara dilukis dan dikeringkan dengan cara dijemur maupun disetrika. Proses selanjutnya adalah pembersihan untuk mempertahankan warna.

Selanjutnya pameran dibuka untuk umum hingga 21 Agustus 2017. Selain 34 lukisan yang dipamerkan, untuk memberi pengetahuan bagi para pengunjung, terdapat ruangan khusus yang memamerkan beberapa tahapan lukisan dan video dokumentasi proses berkarya para perupa. Pameran ini mendapat sambutan yang baik, tercatat sebanyak 4.358 orang mengunjungi pameran ini hingga hari penutupan. ●

Persemaian Nilai Budaya

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif

Hormat kepada orang yang lebih tua, rendah hati dan persahabatan sebagai nilai-nilai penting yang harus terus dilakukan oleh para siswa dalam keseharian.
(Bekti Dyah Hastuti)

Sukses menggelar kegiatan “Persemaian Nilai Budaya Sebagai Penguat Karakter Bangsa” di 25 kabupaten/kota pada tahun 2016, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali

melaksanakan program yang sama pada tahun 2017, kali ini dengan tajuk **Persemaian Nilai Budaya: Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif** dengan tema: “MEDIA INSPIRATIF MEMPERKUAT KEBANGSAAN”. Sebelum 2017, kegiatan ini juga telah dilaksanakan pada





tahun 2012 di 12 kabupaten/kota, tahun 2013 di 30 kabupaten/kota, 2014 di 12 kabupaten/kota, 2015 di 25 kabupaten/kota, dan 2016 di 20 kabupaten/kota.

Kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak didik dan tenaga pendidik untuk menyaksikan tayangan film Indonesia yang berkualitas yang mengandung unsur pendidikan sejarah dan karakter tersebut kembali digelar sebab dinilai sangat efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter bangsa kepada pelajar dan untuk memetakan kebutuhan bahan ajar serta memberikan bahan ajar alternatif di bidang sejarah dan budaya untuk guru di Indonesia.

Dipilihnya film sebagai salah satu produk budaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter bangsa adalah karena film dinilai sangat efektif menjadi media pendidikan bagi anak. Proses internalisasi nilai melalui film diharapkan dapat menciptakan karakter positif melalui karakter-karakter yang diperankan dalam film yang bersangkutan sehingga dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai. Film juga mempunyai efek "magic" cukup kuat dalam mempengaruhi orang. Film menjadi media pendekatan komunikatif (*communicative approach*) yang sangat baik dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter bangsa bisa dilakukan dengan dibuatnya film-film mengenai perjuangan warga Indonesia dalam mempertahankan idealism dan keyakinan rasa cinta pada Indonesia. Lewat audio visual tersebut akan mudah menumbuhkembangkan nilai kebangsaan yang kian terkikis. Nilai yang ada di film akan lebih mudah dicerna. Lewat kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran para pendidik dan stakeholder di bidang

pendidikan tentang pentingnya menumbuh kembangkan nilai-nilai karakter bangsa.

Rencananya, kegiatan **Persemaian Nilai Budaya: Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif** 2017 ini akan digelar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kota-kota yang dipilih adalah kota-kota yang tidak atau belum memiliki sarana gedung bioskop (*theater*), sehingga dapat memberi kesempatan kepada peserta didik dan tenaga pendidik di daerah untuk menonton film-film berkualitas yang dapat menginspirasi dan merangsang mereka untuk berdiskusi mengenai nilai budaya yang terdapat dalam film tersebut.

Film-film yang akan ditayangkan dalam acara ini adalah film nasional yang dinilai mewakili nilai-nilai positif guna persemaian karakter dan semangat kebangsaan, seperti: *Ada Surga di Rumahmu*, *Kita versus Korupsi*, *Sokola Rimba*, *Mencari Hilal*, dan *Kau dan Aku Cinta Indonesia*.

Selain menonton film, acara ini juga akan diisi dengan talkshow yang akan menghadirkan para pemangku kepentingan, praktisi pendidikan dan kebudayaan serta kalangan artis dan produser film. Diharapkan talkshow tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar, tenaga pendidik dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan karakter bangsa dan dunia pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan Persemaian Nilai Budaya: **Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif yang telah terselenggara di tahun 2017 ini diadakan di 18 kota yaitu; Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten**

Kiprah



Temanggung, Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung; Kabupaten Bengkalis, Riau; Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Cilegon Provinsi Banten, Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi Dki Jakarta, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Persemaian Nilai Budaya: Penguatan



Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang ini merupakan kota/kabupaten yang di pilih sebagai kota/kabupaten pertama untuk membuka kegiatan persemaian di tahun 2017 ini, berlangsung tanggal 23-25 Februari 2017. Kabupaten Magelang di pilih sebagai hasil dari kesepakatan bersama antara dengan pihak pemerintah kabupaten dan Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada hari pertama kegiatan, 23 Februari 2017 diisi dengan koordinasi dan persiapan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan instansi lain



terkait. Koordinasi dilakukan terkait dengan berbagai hal pelaksanaan kegiatan persemaian nilai budaya seperti materi dan round down acara, pengisi acara, serta panitia yang akan terlibat dalam kegiatan, sedangkan tempat kegiatan, sesuai dengan koordinasi sebelumnya, diadakan di Gedung Olah Raga (GOR) yang terletak di Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Dari hasil koordinasi tersebut, khususnya terkait dengan *rundown* acara sebagaimana yang telah yang telah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang diputuskan, bahwa bila sebelumnya terdiri dari 2 sesi (guru dan siswa), menjadi 3 sesi (sesi umum) sesuai dengan arahan Direktur Sejarah ketika survei koordinasi sebelumnya. Sesi umum menjadi bentuk sinergi antara Direktorat Sejarah dengan Pusat Pengembangan Film (Pusbangfilm) Kemendikbud yang akan menangani sesi tambahan tersebut. Sementara itu untuk persiapan teknis lainnya menjadi tugas pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan Pemerintah Daerah Magelang.

Melanjutkan rapat koordinasi hari sebelumnya, pada hari kedua tanggal 24 Februari 2017, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dilakukan *technical meeting*, seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Tim kedua dari Jakarta juga telah tiba untuk selanjutnya bersama mempersiapkan kegiatan.

Technical meeting dilaksanakan dengan menghadirkan para guru pendamping dan para petugas yang bertanggung jawab pada pos-pos kegiatan tertentu (registrasi, distribusi, acara dan konsumsi). Acara dipimpin

langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Bapak Haryono, didampingi Kabid Kebudayaan Bapak Husein juga dari pihak Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Kasi Tokoh Sejarah Ibu Herliswany dan Kasi Peristiwa Sejarah Bapak M Ikbal.

Rapat dibuka oleh Bapak Haryono dengan memberi gambaran kegiatan yang akan dilakukan. Beliau menyambut gembira acara ini dan telah mempersiapkan segala yang dibutuhkan sesuai dengan hasil pertemuan hasil survei koordinasi sebelumnya dengan pihak Kemendikbud. Selanjutnya beliau menyerahkan penjelasan teknis kepada pihak panitia Pusat terkait hal-hal yang perlu dijelaskan dan nantinya akan dilaksanakan di lokasi kegiatan keesokan harinya.

Bapak Ikbal kemudian memberi gambaran hal-hal teknis apa yang perlu dilakukan oleh para pendamping siswa, mulai dari kedatangan, teknis pembagian kaos, konsumsi dan absensi bagi para peserta siswa. Pada sesi diskusi beberapa respon para pendamping menanyakan teknis pembagian konsumsi serta kesertaan pendamping lain yang ikut membantu mendampingi para siswa yang berjumlah cukup banyak dan berasal dari beberapa sekolah dari kecamatan yang berbeda. Seperti diketahui pembagian peserta siswa SMP di Kabupaten Magelang berdasar pada sistem rayon yang dalam 1 rayon bisa terbagi dari berbagai kecamatan.

Pada akhirnya terjadi kesepakatan bersama mengenai kerjasama antar pendamping menangani banyaknya siswa dan pembagian administrasi antara para



Kiprah

pendamping dari rayon yang sama. Juga disepakati teknis pendampingan yang akan meminta para siswa menjaga kondisi dengan terlebih dahulu makan siang sebelum berangkat menuju lokasi kegiatan.

Selanjutnya panitia pusat berkoordinasi dengan panitia daerah yang akan bertugas langsung di lapangan pada saat kegiatan nantinya. Dipimpin oleh Bapak Husein, para panitia daerah memperoleh gambaran tugas yang harus dilaksanakan demi kelancaran kegiatan keesokan harinya. Pada pertemuan ini hadir pula motivator guru, Ibu Bekti Dyah Hastuti, yang akan memberikan motivasinya setelah kegiatan nonton bareng selesai. Rapat berakhir pukul 12.00 WIB.

Panitia pusat sendiri terbagi dua, dengan salah satu tim menuju Temanggung untuk melakukan sesi technical meeting terkait kegiatan yang sama, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017. Satu tim yang tersisa kemudian menuju GOR Gemilang untuk mengecek progress persiapan acara sebelum pemutaran film inspiratif dilakukan keesokan harinya.

Di hari ketiga kegiatan tanggal 25 Februari 2017, yang menjadi puncak acara, panitia, baik pusat maupun daerah, telah bersiap sejak pukul 06.30 WIB di lokasi kegiatan. Para peserta guru juga telah mulai berdatangan. Registrasi pun mulai dilakukan, yang terbagi dalam 4 meja, tersedia bagi guru SD dan juga SMP. Registrasi juga terbagi bagi administrasi daerah dan administrasi pusat.

Setelah registrasi para peserta kemudian memperoleh snack dan *goodie bag* yang berisi sertifikat dan CD Pendidikan Karakter dari Kemendikbud.

Selanjutnya para peserta memasuki ruangan dan menempati kursi yang telah disiapkan.

Para narasumber juga telah hadir, untuk kemudian transit di ruang Cemerlang kantor Sekda Kabupaten Magelang.

Sebelum acara resmi dimulai, terlebih dahulu diputar film dokumenter mengenai potensi wilayah Kabupaten Magelang.

Pukul 08.00 WIB acara resmi dimulai dengan penampilan kesenian khas daerah Magelang yaitu kesenian soreng, yang ditampilkan oleh siswa/i SMP Negeri Grabag. Mereka adalah pemenang Lomba Seni Budaya tingkat Kabupaten tahun 2016 lalu. Diiringi oleh iringan musik *live*, penampilan mereka begitu atraktif, kompak dan menarik.

Selanjutnya para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh paduan suara para staf Pemda Kabupaten Magelang dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Direktur Sejarah Ibu Triana Wulandari. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan di Magelang ini merupakan awal dari seluruh rangkaian kegiatan Persemaian Nilai Budaya: Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Media Inspiratif di tahun 2017.





Pendidikan karakter menjadi perhatian penting mengingat kondisi kekinian bangsa yang meminggirkan nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan persatuan. Dan film, menjadi media penting dan inspiratif untuk menyebarkan nilai-nilai positif kebangsaan.

Usai Direktur Sejarah, dilanjutkan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang kemudian menyampaikan pidato dengan berbahagia menyambut terpilihnya Magelang sebagai pembuka kegiatan Direktorat Sejarah. Beliau berharap hal ini menjadi momentum penting bagi agenda besar pembangunan budaya bangsa. Terlebih bagi kepesertaan guru dan siswa yang menjadi wujud kepesertaan pendidikan sebagai media penting perwujudan tujuan nasional.

Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan pemutaran film utama. Pada sesi ini Bapak Sekda menyempatkan diri berfoto bersama Direktur Sejarah dan para tamu kehormatan lainnya, sebelum kemudian meninggalkan acara karena adanya agenda acara lain.

Pemutaran film pertama untuk sesi guru di Kabupaten Magelang adalah *Ada Surga di Rumahmu*.

Sesudah film utama diputar, diadakan dialog dengan narasumber Direktur Sejarah Kemendikbud, Asisten Daerah Kabupaten Magelang dan narasumber film Oka Aurora, penulis skenario film *Ada Surga di Rumahmu*. Direktur Sejarah memotivasi para guru untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan juga mengikuti perkembangan jaman yang modern. Giliran selanjutnya,

Asisten Daerah juga mengharapkan para guru menjadi garda depan dunia pendidikan, terutama di Magelang sebagai daerah yang potensial para generasi mudanya.

Penulis skenario Oka Aurora membagi pengalaman dirinya untuk terus belajar menambah pengetahuan, membuka wawasan baru dan meningkatkan kemampuan diri. Hal ini kemudian terwujud dalam karya. Pengalaman menjadi guru terbaik yang bisa dibagi dengan inspiratif.

Sesi dialog diisi dengan peserta yang menyatakan begitu terinspirasi dengan kisah dalam film yang ditontonnya. Keluarga, agama dan kasih sayang menjadi kunci yang perlu disebarluaskan di setiap aspek kehidupan. Dan hal ini dirasa menjadi catatan penting yang terasa kurang hadir di setiap aspek kehidupan Indonesia saat ini. Atas respon positif tersebut, peserta memperoleh bingkisan berupa buku-buku terbitan



Kiprah



Direktorat Sejarah yang disampaikan langsung oleh Ibu Direktur.

Seorang peserta lain menyampaikan pengalaman dirinya sebagai guru yang memotivasi anak didik melalui perhatian kecil kepada keseharian, seperti membuang sampah pada tempatnya, disiplin waktu untuk sholat dan membantu orang tua. Hal-hal ini menjadi pembelajaran pendidikan karakter. Peserta ini juga mendapatkan bingkisan yang disampaikan langsung oleh Bapak Asisten Daerah Kabupaten Magelang. Total peserta guru yang mengikuti sesi ini berjumlah 740 orang atau mencapai 98 % dari target peserta.



Diluar gedung, para peserta siswa telah hadir, lengkap dengan mengenakan kaos kegiatan yang telah dibagikan sebelumnya. Para guru pendamping kemudian melakukan registrasi, untuk kemudian memperoleh makan siang yang dibagikan kepada para peserta dampungannya. Sembari menunggu sesi pertama berakhir, sekitaran gedung menjadi lautan siswa yang berwarna-warni mengenakan kaos kegiatan. Sesudahnya, peserta memasuki ruangan dan duduk di kursi yang telah tersedia.

Sesi pertama kegiatan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB dan kembali digantikan oleh sesi siswa yang telah hadir sebelumnya. Kasubdit Internalisasi Nilai Bapak Edy





Suardi membuka sesi tersebut dengan memotivasi para siswa untuk terus bersemangat belajar dan menikmati acara karena film yang diputar sangat dekat dengan mereka. Film *Kau dan ACI* mengambil *setting* di Magelang dan disutradari oleh seorang putra daerah, asli kelahiran Magelang.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Bapak Haryono kemudian juga membacakan sambutan Bupati Magelang terkait kegiatan yang dilakukan. Bupati mengharapkan kegiatan ini bisa berlanjut rutin dan terprogram di waktu-waktu selanjutnya karena dirasa mampu memberi efek positif bagi dunia pendidikan khususnya. Selanjutnya diputar film *Kau dan Aku Cinta Indonesia* bagi sesi siswa yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama Kasubdit Internalisasi Nilai Direktorat Sejarah, Plt Kadisdikbud Kabupaten Magelang, motivator anak Ibu Bekti Dyah Hastuti dan pemeran film *Kau dan ACI* Jay Wijayanto. Secara garis besar, baik Bapak Edy Suardi dan Bapak Haryono, mengingatkan para siswa untuk mampu mengambil nilai-nilai positif dari film yang telah ditonton dan mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Ibu Dyah Hastuti menekankan pentingnya hormat kepada orang yang lebih tua, rendah hati dan persahabatan sebagai nilai-nilai penting yang harus terus dilakukan oleh para siswa dalam keseharian.

Film Jay Wijayanto kemudian membagikan pengalamannya untuk bermimpi setinggi langit meraih harapan. Beliau menekankan pentingnya usaha dan membuka wawasan baru demi meraih cita-cita. Dengan berinteraksi aktif dengan peserta siswa, beliau juga membagikan hadiah bagi peserta siswa yang aktif maju dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Satu catatan yang didapatkan dari sesi bersama Jay Wijayanto adalah kenyataan bahwa seorang siswa tidak dapat menyebutkan 3 lagu nasional yang menjadi pertanyaan dari beliau.



Secara umum, sesi diskusi menjadi lebih menarik dan interaktif. Sesi ini ditutup dengan para siswa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang dipimpin langsung oleh Jay Wijayanto.

Para siswa kemudian keluar gedung dengan membawa tas kegiatan yang dibagikan melalui guru pendampingnya masing-masing.

Total 750 siswa mengikuti sesi ini atau mencapai 100 % dari target pencapaian peserta.

Kurang lebih pukul 14.00 WIB, sesi siswa berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Sesi ini pada awalnya merupakan kerjasama dengan Pusat Pengembangan Film Kemendikbud, yang akan menanganinya sebagai bagian dari pelaksanaan program kegiatan mereka sekaligus menjadi sinergitas antar institusi dalam Kemendikbud. Namun pada akhirnya di H-1 kegiatan, Pusbangfilm memutuskan untuk tidak berpartisipasi karena satu dan lain hal. Pada akhirnya sesi ketiga di Magelang ditangani sepenuhnya oleh panitia dari Direktorat Sejarah.

Sesi ini para peserta mulai memasuki ruangan dan dibuka sambutan singkat dari Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Edy Suardi. Sesudahnya langsung diputar film *Ada Surga di Rumahmu* sebagai sajian utama. Sesi ini menghadirkan 500 orang dari undangan yang disebarkan oleh pihak Pemda Kabupaten Magelang. Kurang lebih pukul 17.00 WIB seluruh rangkaian acara pelaksanaan kegiatan Persemaian Nilai Budaya: Penguatan Pendidikan Karakter melalui Media Inspiratif di Kabupaten Magelang telah berakhir. Pelaksanaan berlangsung lancar, aman dan tertib dengan tercapainya sebagian besar target berkat kerjasama yang terpadu antara panitia pusat dan daerah. ●

Malapetaka Malnutrisi di Jakarta

Kwashiorkor dan Persoalan Kesehatan Tahun 1950an

Oleh: Martina Safitry

Jakarta adalah sebuah kota metropolitan dengan gerak kemajuan yang sangat pesat. Pemerintah provinsi telah merancang DKI Jakarta untuk menjadi kota metropolitan kelas dunia dengan mengembangkan bisnis, industry, dan pembangunan berbagai fasilitas penunjang di setiap sudut kota. Namun dengan segala kemajuan dan perkembangannya, ternyata masih menyisakan persoalan kesehatan terutama gizi buruk atau malnutrisi. Masalah malnutrisi menjadi ancaman besar bagi masa depan Indonesia. Hal tersebut disampaikan ahli nutrisi dan kesehatan masyarakat dari London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of Chile, Prof Ricardo Uauy Dagach, MD Phd dalam sebuah jumpa pers di Jakarta. Dalam istilah medis, kelebihan maupun kekurangan makanan akan menyebabkan kelainan gizi atau *Malnutrisi*. Kekurangan kuantitas makanan disebut Marasmus, kekurangan kualitas makanan disebut *Kwashiorkor* sedangkan kelebihan kuantitas dan kualitas makana disebut *over-nutrition* (Pickett, 1995: 390 dan Slamet, 2005: 170). Gaya hidup disebutkan menjadi penyebab utama munculnya masalah tersebut.

Awal tahun 2017 Jakarta dihebohkan dengan beberapa kasus gizi buruk terutama pada anak-anak yang mencuat di media nasional. Malnutrisi pada anak dalam jangka panjang bisa menjadi jembatan kematian pada usia muda akibat penyakit degeneratif atau kecacatan. Negara akan kehilangan investasi terbesarnya yaitu sumber daya manusia berkualitas yang produktif. Padahal dalam hal ini Negara harus bisa hadir dan menjamin kuantitas dan kualitas kesehatan

masyarakatnya. Permasalahannya adalah seringkali jumlah penduduk yang semakin bertambah, tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi makanan sehat dengan harga terjangkau.

Kwashiorkor Momok Menakutkan Bagi Kesehatan Anak

Kejadian malnutrisi terutama marasmus dan kwashiorkor tidak hanya terjadi belakangan saja. Penelitian intensif tentang penyakit ini sudah dilakukan sejak masa Orde Lama. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Makanan Rakyat, Departemen Kesehatan Rakyat bekerja sama dengan WHO. Laporan penelitian tersebut kemudian diberi tajuk "Preliminary Survey on Malignant Malnutrition in Djakarta Toddlers". Hasilnya sungguh mencengangkan, dari 2748 pasien anak yang mengunjungi klinik dan poliklinik, 146 diantaranya menderita kwashiorkor akut. Perbandingannya adalah 1:18. Padahal penelitian hanya dilakukan dalam waktu 2 bulan, 1 Oktober sampai 15 Desember 1952. Menurut Menteri Kesehatan dr. J. Leimena, penyebab umum penyakit ini adalah kekurangan makanan dan kekurangan pengetahuan tentang makanan.

Simptoma kwashiorkor yang ditemukan diantaranya adalah keterlambatan pertumbuhan, perubahan pada kulit dan warna rambut, pembengkakan (oedema) terutama dibagian wajah atau *the full moon face* dan liver, dermatosis atau infeksi kulit dan perubahan pigmen kulit, *Gastrointestinal disorder* atau gangguan pencernaan, *mental state* atau gangguan

psikologis, anemia atau kurang darah, *muscle atrophy* atau penyusutan jaringan otot, *emaciation* atau kehilangan lemak dan cairan tubuh, *xerophthalmia* dan *keratomalacia* atau keadaan parah dalam gejala malnutrisi dan terakhir bisa berakhir dengan kematian.

Cara mudah mendeteksi penderita kwashiorkor pada anak yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur bila perbandingan berat badan dengan umurnya dibawah 60% (standar WHO-NCHS) maka anak tersebut dapat dikatakan terindikasi busung lapar atau dengan cara mengukur tinggi badan dan lingkaran atas bila tidak sesuai dengan standar anak yang normal kurang dari 14 cm (standar WHO-NCHS) waspada akan terjadi kwashiorkor (Pickett, 1995: 391).

Penelitian dilakukan hanya di klinik dan poliklinik

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Artinya, angka ini akan bertambah banyak jika dilakukan pemeriksaan "jemput bola" ke seluruh wilayah Jakarta. Terhadap masalah kwashiorkor ini, Menteri Kesehatan mengatakan "genting" dan pada waktu itu masih belum mendapat perhatian dari kalangan kedokteran. Oleh karenanya Menteri menghimbau kepada para dokter untuk melakukan diagnosa secepat mungkin terhadap pasien yang diduga menderita kwashiorkor. Selain itu kementerian kesehatan akan berupaya memberikan kampanye pendidikan kepada para ibu tentang makanan seimbang dan penyediaan makanan yang tepat untuk anak (1953: III).

Dr. H.A.P.C Ommen, salah satu peneliti gizi dari WHO menambahkan pula penyebab kwashiorkor adalah



asupan makanan yang salah, baik oleh kekurangan kalori, maupun kekurangan zat telur (protein). Ia menegaskan sekali lagi pentingnya soal makanan yang baik (adequate, sempurna) bagi kesehatan, terutama anak-anak yang berumur 8 bulan sampai 5 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak-anak karena merupakan masa yang menentukan sehat dan kuatnya anak-anak pada tahun-tahun kemudian. Di Indonesia ketika itu terbukti, bahwa justru di masa kehidupan inilah terdapat angka-angka kematian anak-anak yang paling tinggi. Pemeriksaan kwashiorkor di Jakarta menegaskan bahwa pada umumnya, bukan kemiskinan (*poverty*) melainkan kurang pengetahuan (*ignorance*), kurang perawatan (*neglect*) dan kebiasaan (*habits*) salah yang menjadi penyebab utama penjakit ini (1953: 26-27).

Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan perkotaan, yang sangat membutuhkan pangan murah. Angka tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan masyarakatnya, terutama pada 1950an, rendahnya angka tersebut erat terkait dengan faktor sosial-ekonomi, peran maupun posisi kelas perempuan dan anak dalam masyarakat dengan status kesehatan mereka. Peran serta posisi sosial yang rendah pada perempuan sangat berpengaruh pada status gizi anak, malnutrisi, penyakit serta kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan maupun produktifitas perempuan dan anak (Moordiaty, 2003 dan Lubis, 2008: 45-46).

Propaganda Membangun Keluarga Sehat

Seperti yang telah disinggung diatas, Departemen Kesehatan Rakyat melakukan kampanye makanan sehat sebagai edukasi kepada para ibu. Dalam konferensi kesehatan masyarakat tahun

1950an, Departemen Kesehatan Rakyat menyinggung permasalahan malnutrisi ini. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dengan mengadakan blitz survey (survey kilat), tidak hanya di Jakarta tetapi juga bersama-sama dengan Bupati dan staf kabupaten di daerah sekitar Jakarta. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan sambil menunjukkan poster "Empat Sehat Lima Sempurna" dan sedapat-dapatnya dengan memberikan contoh komposisi nasi 200gr, sayuran 100 gr, tempe 50 gr, daging 30 gr, buah-buahan dan lain-lain.

Selain penyuluhan, usaha yang diupayakan oleh Departemen Kesehatan Rakyat adalah bekerjasama membuat pabrik saridele yang dimaksudkan sebagai pengganti susu sapi. Susu sapi pada waktu itu adalah sebuah barang mewah dengan harga yang mahal. Usaha lain adalah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, pada waktu itu, untuk memperbesar jumlah tangkapan ikan untuk meninggikan jumlah protein hewani. Ikan-ikan tersebut kemudian dibuat tepung ikan agar mudah melakukan distribusi ke daerah pelosok. Pada tahun 1954 didirikan Sekolah Djuru Penerangan Makanan untuk menghasilkan Djuru Penerangan Makanan dan

Djuru Dapur yang akan bekerja di Rumah Sakit, dan organisasi-organisasi Lembaga Makanan Rakyat (Depkes, 1954: 15).

Persoalan Ketahanan Pangan di Indonesia

Persoalan malnutrisi bukan semata-mata masalah kesehatan, melainkan juga perekonomian terutama ketahanan pangan. Indonesia memang pernah menjadi salah satu negara dengan swasembada pangan terbesar namun persepsi bahwa swasembada beras identik dengan ketahanan pangan adalah seperti mitos yang direproduksi ulang dari masa ke masa. Beras dipandang sebagai sumber pangan



utama di Indonesia. Tingginya ketergantungan pada beras di daerah seperti Timor, Maluku, Papua, dan Kalimantan telah terjadi sejak pemerintah kolonial memberlakukan perdagangan antar pulau di Nusantara. Pada masa depresi ekonomi pengendalian harga beras dipegang langsung oleh pemerintah Belanda. Kemudian tahun 1934 baru dibentuk badan pengawas terhadap pengendalian pangan yaitu, Stichting Het Voedingsmidlenfonds (VMF) yang kemudian hari, menjadi cikal bakal Bulog – Badan Urusan Logistik.

Pada masa pemerintahan Sukarno tahun 1952 sampai 1956, kebijakan ketahanan pangan dilakukan dengan sebuah program yang dinamai sesuai nama menteri pertanian yang menjabat pada saat itu, Program Kesejahteraan Kasimo. Program ini digawangi oleh Yayasan Bahan Makanan (BAMA) dan Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Memasuki tahun 1956, Sukarno kemudian memfokuskan kepada swasembada beras dengan program sentra padi yang digawangi oleh Yayasan Badan Pembelian Padi. Kebijakan ketahanan pangan Sukarno memiliki motif politik yang idealis. Memasuki tahun 1960-an, Sukarno kembali mengobarkan semangat revolusi dengan menolak bantuan asing terutama soal pangan. Dan ucapan paling menggetarkan yang keluar dari mulut Sukarno adalah *“go to hell with your aid*, bagi semua bantuan asing”. Politik menutup diri ini dijawab Sukarno dengan pelaksanaan proyek intensifikasi padi pada tahun 1962 (Prisma, September 1980, Reid, 1984: 153-155 dan Lassa, 2005: 4-5). Permasalahannya adalah upaya mencapai swasembada pangan seringkali tidak disertai oleh upaya penguatan ketahanan pangan. Kekuatan ketahanan pangan hanya dititikberatkan kepada swasembada beras.

Penutup

Dari kasus kwashiorkor yang terjadi tahun 1950an terbukti bahwa pendidikan kesehatan untuk membangun kesadaran pembentukan manusia Indonesia sehat dan berkualitas adalah hal utama yang harus dibangun. Bukan hanya persoalan kemiskinan yang menjadi akar permasalahan namun juga gaya hidup perkotaan yang tidak diimbangi oleh pengetahuan kesehatan yang baik menyebabkan kasus malnutrisi masih terjadi di kota-kota besar. Nyatanya pemerintah

baru melakukan tindakan setelah ditemukannya anak-anak pengidap malnutrisi.

Daftar Referensi

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, April 1954. Konferensi Dinas Kementerian Kesehatan (7-11 April 1954). “Uraian Tentang Tjataan Mengenai Masalah Makanan”

Firman Lubis. Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja. Jakarta: Masup Jakarta. 2007

-----, Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa. Jakarta: Masup Jakarta. 2008

<http://health.liputan6.com/read/2853422/benarkah-prevalensi-gizi-buruk-di-jakarta-masih-tinggi>

<https://kumparan.com/@kumparannews/masih-ada-balita-gizi-buruk-di-jakarta>

Juli Soemirat Slamet. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press. 2002

Lassa, Jonathan. “Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005”. E-book dari <http://www.scribd.com/doc/90893942/3ddf-Politik-Ketahanan-Pangan-Indonesia-1950-2005>, diakses tanggal 13 Juli 2012.

Lembaga Makanan Rakjat. 9 Februari 1953, “Preliminary Survey on Malignant Malnutrition in Djakarta Toddlers”.

Mulyadi. Hambatan Sosial Budaya dalam Pemenuhan Gizi Balita di Pedesaan. Yogyakarta: Laporan Penelitian Fakultas Sastra UGM. 1994/1995

Pickett, George dan John J. Hanlon. Kesehatan Masyarakat: Administrasi dan Praktek. Jakarta: EGC. 1995.

Prisma No.9, September 1980 “Politik Fatamorgana”

Reid, Anthony. “The Pre-Colonial Economy of Indonesia” dalam Buletin of Indonesia Economic Studies Vol.XX no. 2, Agustus 1984.

Republika, 30 Mei 2012, “Indonesia Dihantui Malnutrisi”.

Sumber Sejarah Indonesia di Jepang

Sebuah Laporan Awal

Oleh: Tirmizi

Jepang pertama kali datang untuk menyerang Hindia Belanda (Indonesia kini) pada 11 Januari 1942 di Tarakan, bagian timur pulau Kalimantan. Pada hari yang sama pasukan payung (parasut) Angkatan Laut Jepang mendarat di Manado. Pasukan payung Angkatan darat juga mendarat di Palembang pada 14 Februari. Pendaratan ke Jawa dilakukan pada 1 Maret. Komandan operasi ini, Jenderal Imamura, mendarat di Merak, Banten. Pada 9 Maret Belanda menyerah dan Jepang mulai menduduki Hindia Belanda.

Saat menduduki Indonesia, wilayah Indonesia dibagi tiga. Jawa diduduki Angkatan Darat ke-16, Sumatera oleh Angkatan Darat ke-25 bersama dengan Malaya dan Singapura, sedangkan Indonesia Timur diserahkan ke Angkatan Laut.

Kebijakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) antara lain adalah seruan *romusha*, wajib serah beras, *Shumubu* (Kantor Urusan Agama), *Nanpo Tokubetsu Ryugakusei* (Mahasiswa Khusus dari Daerah Selatan), pendidikan, Tonarigumi (Rukun Tetangga [RT], satuan pemerintahan terbawah untuk mengawasi aktifitas warga dan mendukung kebijakan politik dan ekonomi Jepang), Pembela Tanah Air (PETA), *Sendenbu* (Departemen Propaganda yang dibentuk di dalam badan pemerintahan militer [Gunseikanbu]), Seinendan (Organisasi barisan pemuda untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri), Keibodan (*Organisasi Keamanan*), *Chuo Sangiin* (Badan yang bertugas mengajukan usul

kepada pemerintah, menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai soal-soal politik, dan menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Badan penting lain yang ada pada masa pendudukan Jepang adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kebijakan pada masa Pendudukan Jepang menjadi bagian dari dinamika sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan politik Indonesia. Memahami kembali masa ini menjadi bagian penting untuk merekonstruksi perjalanan panjang kebangsaan Indonesia dari masa ke masa untuk memperoleh kearifan sejarah dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa kini dan akan datang. Umum diketahui bahwa pada periode ini, sumber-sumber sejarah tidak banyak diperoleh. Hal ini disebabkan antara lain karena dokumen-dokumen resmi pada masa pendudukan Jepang dibakar oleh Jepang sendiri dan kekacauan selama revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Namun, beberapa di antaranya selamat karena disita oleh pasukan Sekutu. Di Jawa pasukan Inggris segera setelah perang usai atau oleh Belanda pada masa itu menyita dokumen tersebut; Di Jepang tentara Amerika Serikat menyita dokumen Markas Besar Kekaisaran dan pemerintah Jepang yang menyangkut Jawa dan adalah salinan dokumen atau laporan asli yang dikirim dari Jawa. Akan tetapi, setelah diperiksa Amerika Serikat, 10 tahun kemudian dokumen yang disita ini dikembalikan lagi ke Jepang.

Oleh karena itu, untuk melengkapi gambaran Indonesia pada masa pendudukan Jepang atau



yang terkait hubungan Indonesia-Jepang, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menelusuri sumber-sumber sejarah Indonesia di Jepang, khususnya di Tokyo. Penelusuran sumber yang dilakukan pada 14-20 Desember 2017 adalah mengumpulkan data tentang dokumen-dokumen kesejarahan yang ada di The National Institute for Defense Studies Archive, Kementerian Pertahanan Jepang; Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan; Waseda University; PT Ryukei Shosha. Rangkaian kegiatan ini diperdalam dengan diskusi bersama sejarawan Prof. Aiko Kurasawa (Keio University), Dr. Toshio Matsumura (Indonesianis dari Hosei University) dan Ibu Alinda Fitriany Malik Zain (Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Tokyo, Jepang) tentang sumber sejarah Indonesia di Jepang dan kajian sejarah Indonesia di Jepang.

Tulisan berikut akan menguraikan secara singkat dan bersifat pendahuluan saja tentang beberapa tempat beradanya sumber sejarah dan beberapa dokumen yang berada di dalamnya serta diakhiri ulasan ringkas tentang pengaruh sumber sejarah terhadap penulisan sejarah. (Tulisan ini tidak menutup kemungkinan keberadaan sumber sejarah di tempat-tempat lain di Jepang baik yang dimiliki oleh instansi lainnya maupun perorangan)

The National Institute for Defense Studies Archive

The Defense Research Institute War History Research Center di Kementerian Pertahanan Jepang mempunyai sekitar 57000 buku terkait dengan Angkatan Darat (sekitar 150 seri) dan sekitar 36000 buku tentang hubungan-hubungan Angkatan Laut (sekitar 90 seri). Bahan-bahan sumber sejarah ini berasal dari (1) bahan-bahan sumber sejarah yang dikembalikan oleh Amerika Serikat (terutama sumber sejarah yang diterima militer Amerika setelah berakhirnya Perang Asia Timur Raya (Perang Pasifik); (2) Bahan-bahan sumber sejarah yang dipilah oleh the Ministry of Health and Welfare Department staff; (3) bahan-bahan yang dikumpulkan dan disumbangkan oleh The National Institute of Defense for war history publication yang diterbitkan oleh the Great East Asia War and research on war history

Sumber-sumber sejarah yang terkait dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut, meliputi: Perang Cina-Jepang, Perang Rusia-Jepang, Insiden Manchuria, Perang Asia Timur Raya, Administrasi militer seperti catatan strategi perang, hukum perang, unit, sekolah, personel tentara, kapal, teknologi, dan pelucutan senjata.

Beberapa dokumen sejarah yang dijumpai dalam lembaga ini adalah *Nanpo Keizai taisaku yoko* (Prinsip-prinsip utama langkah-langkah perekonomian di wilayah Selatan), *Nanpo senryochi gunsei jissi no taiyo* (Kerangka pelaksanaan administrasi militer di wilayah selatan), *Horandea shu Sentani gun seimu han kosaku hokoku* (Laporan tentang operasi unit urusan politik di daerah Sentani, Provinsi Hollandia), *Rikua mitsu dai 440 go sakusen chiiikina ni okeru teki san shori ni kansuru ken tsucho, Jikan Yori nanpo gun so sanbo cho ate* (Rahasia-Angkatan Darat-Asia No. 440 notifikasi tentang penyelesaian aset-aset musuh di wilayah operasi militer, dari Wakil Menteri ke Kepala Staf Umum angkatan darat di Selatan); *Sumatora gunsei no gaiyo—Bessatsu sono 3* (Kerangka administrasi militer di Sumatra—jilid terpisah No.3); *Tokushu bokutai, do jidosha tai shozoku no genjumin ni taisuru keibatsu horei no tekiyo narabini kore ka saibanken ni kansuru ke hokoku, Osamu Shudan homu bucho: Oka butai homu bucho Okamura Shunji* (Laporan tentang penerapan hukum pidana kepada penduduk setempat yang dikaitkan dengan Korps Pertahanan Udara Khusus, Korps otomobil Khusus, dan mengenai yurisdiksinya; dari: Tsumura Kanzo, Kepala, Divisi Legal, Kelompok Osamu ke: Okamura Shunji, Kepala, Divisi Legal, Korps Oka); *Genzo shinkoku kojutsu oboe, Nansei homen kaigun minseifu* (Memo-memo verbal yang melaporkan situasi-situasi terkini, Pemerintah sipil di Angkatan Laut di wilayah Barat daya); *Official Gazette Bulanan 5 Jilid* (Official Gazette yang diterbitkan di Malaya/Sumatera); *Nanpo keizai rikugun shori yoryo, dai honei rikugun bu-Gokuhi* (Kerangka rencana Angkatan darat untuk pengelolaan perkonoman wilayah Selatan, Markas Besar Kekaisaran, Divisi Angkatan Darat—sangat rahasia); *Minsei kankei jimu hikitsugi sho, serebesu minseifu* (Dokumen tentang penyerahan pekerjaan pemerintah sipil, Divisi pemerintah sipil Celebes).



(Official Gazette Bulanan 5 Jilid, diterbitkan di Malaya/ Sumatera, adalah salah satu sumber sejarah primer yang ada di The National Institute for Defense Studies Archive)



Foto Tim Direktorat Sejarah (Isak Purba, Tirmizi, dan Gunawan Widjaja [Galeri Antara]) bersama Ibu Aiko Kurasawa (Keio University) dan Bapak Naoki Kanno (Kepala Arsip Militer, Pusat Sejarah Militer, National Institut for Depense Studies) di Kementerian Pertahanan, Tokyo, Jepang.

Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan

Arsip pada masa pendudukan Jepang di Kementerian Luar Negeri Jepang (1942-1945) praktis tidak ada. Arsip tersebut hilang dibakar selama masa perang. Akan tetapi, terdapat arsip diplomatik sebelum

masa perang dan setelah masa perang. Beberapa arsip MOFA (Japanese Ministry of Foreign Affairs) tentang Indonesia setelah perang antara lain adalah Arsip MOFA B'0151 (Ikhtisar pertemuan dengan Presiden Soekarno, dari deputy konsul kepada Menteri Luar Negeri 11 Januari 1964); Arsip MOFA B'015 (Tentang negosiasi pampasan perang dari Menteri Wajima ke Menteri Luar Negeri 17 April 1956; Proses negosiasi Jepang-Indonesia untuk pampasan perang, Januari 1954-Juli 1955); Arsip MOFA A'0210 (Ketegangan politik pada malam menjelang peristiwa 30 September); Arsip MOFA A'0211 (Tentang politik internal Indonesia dan kudeta).



(Salah satu Arsip tentang Indonesia setelah Perang di kantor Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan)

Waseda University

Sumber-sumber sejarah tentang Indonesia di Waseda University terdiri dari The Nishijima Collection, The Masuda Collection, dan Koleksi Foto Asahi Shinbun (Koleksi Fuji Soko).

The Nishijima Collection adalah pepustakaan dengan dokumen yang dikumpulkan oleh kelompok studi Indonesia yang dikepalai Shigetada Nishijima pada akhir tahun 1950-an dan disumbangkan ke Waseda University pada tahun 1971. Dokumen-dokumen resmi tersebut adalah: (1) 15 volume (28 item dalam bahasa Jepang) tentang administrasi militer di kawasan selatan pada umumnya; (2) 53 volume (115 item: 93 bahasa Jepang, 14 bahasa Indonesia, 8 bahasa Inggris dan 5 bahasa Belanda) tentang pemerintahan militer di Jawa; (3) 43 volume (61 item: 50 bahasa Jepang, 11 bahasa lainnya) tentang administrasi wilayah-wilayah yang diduduki oleh Angkatan laut; (4) 9 Volume (16 item dalam bahasa Jepang) tentang administrasi militer di



Borneo Utara; (5) 20 volume (59 item: 47 bahasa Jepang dan 12 bahasa lainnya) tentang masalah kemerdekaan Indonesia;



(The Nishijima Collection di Waseda University)

The Masuda Collection disumbangkan ke Institute of Social Sciences, Waseda University pada tahun 1990 oleh Prof. Emeritus Dr. Ato Masuda. Isi koleksi Masuda antara lain adalah tulisan, pidato, dan biografi tokoh pemerintah Republik selama Revolusi Nasional; tulisan

dan memoir tokoh-tokoh nasionalis; sumber primer pada masa demokrasi konstitusional; tulisan-tulisan Nugroho Notosusanto dan bahan-bahan tentang sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Bahan tangan pertama tentang Partai Komunis Indonesia; bahan-bahan tentang masalah pertanian, petani dan buruh; karya-karya dalam ilmu sosial (hukum, ekonomi dsb); Sastra dan bahasa dan Majalah dan Surat Kabar 1950-an-1960-an

The Masuda Collection tentang sumber sejarah Indonesia pada masa pendudukan Jepang tidak banyak. Hanya berisi 23 item, yaitu Almanak Asia-Raya 2603; Almanak Nasional 1942; Buku Undang-Undang Gunseikanbu 1944; Djawa Baroe; Kamus bahasa Nippon-Indonesia; Semangat Nippon; dan Percakapan bahasa Melayu.



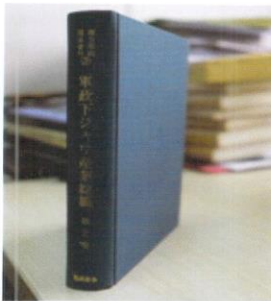
(Koleksi Masuda di Waseda University)



(Katalog Koleksi Asahi Shinbun (Koleksi Fuji Soko) berisi 70,000 lembar tentang Asia Tenggara zaman perang, Waseda University)

PT Ryukei Shosha

PT Ryukei Shosha adalah penerbit yang khusus menerbitkan ulang sumber-sumber primer mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa terbitannya antara lain:



Overview Industri Jawa di Bawah Penjajahan Jepang (Gunseika Jawa Sangyo Sokan) 2 jilid (*highly classified document*). Laporan hasil survey pertanian/ industri Jawa berdasarkan data-data statistik rahasia);



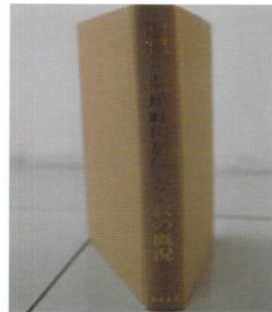
Memoar Tentara Penjajahan di Jawa (Memoar oleh diplomat ahli Hindia Belanda, Miyoshi).



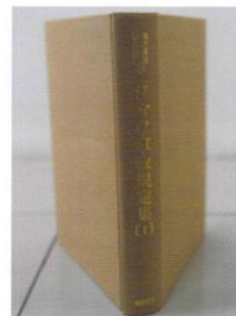
Otobiografi Rahmat Shigeru Ono (Dokumentasi otobiografi oleh salah satu orang dari 903 tentara Jepang yang ikut perang kemerdekaan);



Jawa Boei Giyugun Shi (berisi Sejarah Tentara Pembela Tanah Air. Hasil wawancara 300 orang tentara Jepang oleh penulis yang pernah ikut serta PETA);

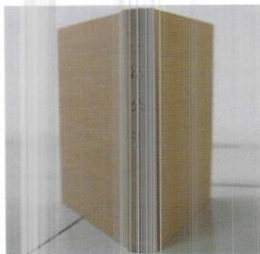


Jawa ni Okeru Bunkyo no Gaikyo (Situasi Pendidikan di Jawa. *Highly clasified Official Document*. Kebijakan pendidikan Gunseikanbu dan laporan tentang situasi pendidikan di Jawa. Mengandung data-data dan statistik yang tidak bisa didapatkan dari materi lain);

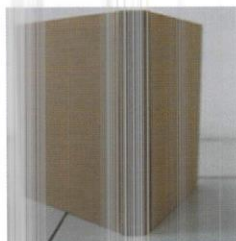


Kumpulan peraturan penjajahan Jepang di Jawa (*Highly classified document*). Memuat 4 macam peraturan perundangan-undangan penjajahan Jepang di Jawa:

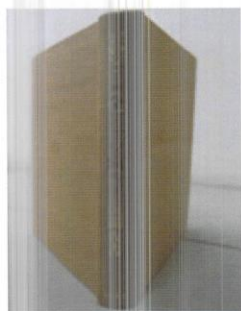
1. pemerintahan yang mengungkap struktur pemerintahan.
2. Peraturan pegawai orang Indonesia.
- 3 dan 4. Peraturan tentang Romusha;



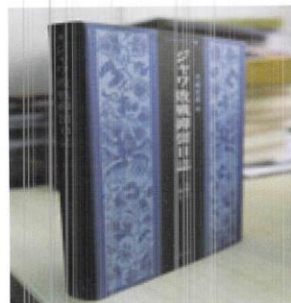
Tomii Koho (*Official Gazette* yang diterbitkan oleh Gunseikanbu angkatan darat ke-25 Jepang (kelompok Tomii) yang menjajah Melayu, Singapura, dan Sumatera);



Malay Koho (*Official Gazette* yang diterbitkan oleh Gunseikanbu Malay yang menjajah Melayu dan Singapura, setelah angkatan darat angkatan darat ke-25 Jepang (kelompok Tomii) dipindahkan ke Sumatera);



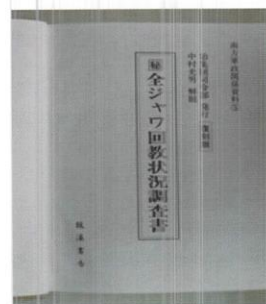
Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chosasho (Laporan situasi Islam di seluruh Jawa. *Classified document*. Sumber primer mengenai kebijakan politik Jepang terhadap Islam dan situasi agama Islam di Jawa pada 1943;



Catatan Harian seorang tawanan paksa penyerahan di Jawa 1946-1947 (Catatan harian oleh seorang opsir Jepang selama dikerjakan di Tanjung Priok sebagai tawanan perang);

Sumber sejarah baru dan pengaruhnya pada penulisan sejarah

Ditemukannya sumber sejarah baru akan berpengaruh pada penulisan sejarah, yaitu memperkaya penulisan sejarah sebelumnya. Sebagai contoh dalam bagian ini akan diulas sumber sejarah yang berjudul *Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chosasho* (Laporan situasi Islam di seluruh Jawa). Salinan laporan ini ada dua, satu di perpustakaan Pusat Kajian Asia Tenggara di Universitas Kyoto dan satu lagi berada di koleksi *Nihon Indonesia Kyokai* (Asosiasi Indonesia Jepang), Tokyo, keduanya bersegel "rahasia" yang menunjukkan laporan tersebut tidak dimaksudkan untuk umum.



(Halaman judul dalam *Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chosasho*, yang diterbitkan oleh Ryukei Sosha)

Pencetakan kembali laporan survey ini adalah bagian dari hasil sebuah proyek, Forum untuk Bahan Penelitian tentang Pendudukan Jepang di Indonesia, yang didukung oleh Toyota Foundation di Jepang. Proyek tersebut ditujukan untuk memulihkan bahan-bahan kontemporer dan juga koleksi kesaksian-kesaksian lisan, tentang Pendudukan Jepang di Indonesia. Serangkaian dokumen bersejarah yang diperoleh oleh penggiat-penggiat anggota Forum sudah diterbitkan dalam bentuk cetak ulang oleh penerbit Ryukei termasuk dokumen *Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chosasho* ini.

Laporan ini adalah sumber primer mengenai kebijakan politik Jepang terhadap Islam dan situasi agama Islam di Jawa pada 1943. Membaca sumber sejarah ini melahirkan pandangan baru. Selama ini penulisan sejarah pada masa pendudukan Jepang, khususnya kebijakan Jepang terhadap Islam (yang dipelopori oleh kajian Harry J Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*, The Hague and Bandung, W. Van Hoeve, 1958 dan peneliti-peneliti sesudahnya) sangat menekankan pengaruh *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) dalam merumuskan kebijakan Islam.

Terbitnya laporan ini menunjukkan bahwa Jepang mempunyai tim sendiri yang berpengaruh sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan Islam pemerintah militer Jepang. Menurut Mitsuo Nakamura, Sejarawan Jepang ahli sejarah Islam di Indonesia, dalam kata pengantar buku sumber ini, *Zen Jawa Kaikyo Jokyo Chosasho*, laporan tersebut dipersiapkan oleh individu-individu yang bekerja dalam seksi intelijen Angkatan Darat ke-16, berkode Beppan ("Tim Terpisah"). Beppan mempunyai sejumlah grup operasi yang lebih kecil, di antaranya yang dinamakan "Kaikyo-han (Tim Islam)" dengan beberapa muslim Jepang. Tim ini sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan Islam pemerintah militer Jepang. Grup ini setengah rahasia, terpisah dari dan tidak mempunyai hubungan organisasi langsung dengan Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah bagian administrasi militer Jepang di Jawa.

Mengapa Jepang mendekati Islam? Angkatan darat ke-16 Jepang (berkode Grup Osamu), yang menduduki Pulau Jawa dan Madura, memandang hubungannya dengan penduduk lokal muslim sebagai salah satu kawasan yang terpenting dalam administrasi pendudukan sejak awal. Panglima tertingginya saat masuk ke Batavia mengatakan, dalam keputusan Administrasi Militernya no. 1 tanggal 28 Maret 1942, bahwa "agama yang umum dianut sejak lama oleh penduduk tersebut akan diperlakukan secara hormat". Sejak saat itu serangkaian kebijakan Islam yang gencar-gencaran diikuti oleh pemerintah pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun sampai menyerahnya Jepang pada kekuatan Sekutu pada 15 Agustus 1945. Militer Jepang menggunakan kelompok kecil tetapi mencolok orang-orang Islam Jepang yang berperan penting dalam berhubungan dengan pemimpin Islam setempat, Kiyai dan ulama. Lantaran periode pendudukan Jepang, kedudukan dan kekuatan Islam di masyarakat Jawa—juga di seluruh masyarakat Indonesia—meningkat pesat.

Sejumlah transformasi penting dihasilkan selama Periode Pendudukan Jepang. Status Islam naik dan jurubicaranya memperoleh prestise sosial dan politik sebagai tokoh organisasi agama maupun organisasi nonagama. Kantor Urusan Agama (*shumubu*), pengganti dari *Kantoor voor Inlandsche Zaken* (Kantor untuk urusan pribumi) pada masa kolonial Belanda, dibentuk kembali sebagai salah satu divisi utama dalam administrasi militer Jepang dan orang-orang Indonesia diangkat sebagai kepalanya, yang menyediakan dasar bagi terbentuknya Kementerian Agama pada masa pascaperang. Sementara semua partai politik dan asosiasi sosial dilarang, MIAI (Madjlisul Islami a'laa Indonesia), organisasi payung seluruh asosiasi Islam di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1937, tidak hanya diizinkan untuk meneruskan aktifitasnya dengan majalahnya yang bernama "Soera MIAI" namun akhirnya berubah menjadi Masjumi (*Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia*) yang lebih kuat lagi, dan diakui secara resmi oleh Jepang. Sebagaimana diketahui, Masjumi menjadi partai politik yang kuat persis setelah Perang dan terus berperan penting dalam periode awal Republik Indonesia sampai tahun 1960. Lebih jelas lagi, Jepang membolehkan pemimpin muslim untuk membentuk pasukan relawan sendiri, Hizbullah, yang menjadi



unsur militer penting pada awal Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Tiga transformasi penting tentang Islam Indonesia pada masa itu (*Shumubu*, MIAI, dan *Hizbullah*) membuat Harry J. Benda menyimpulkan bahwa Islam Indonesia meraih posisi kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya dan yang tidak lagi mudah digantikan.

Menurut Mitsuo Nakamura, kebijakan Islam dari Jepang yang tampaknya berhasil itu tidaklah disengaja. Kebijakan tersebut adalah hasil dari pengumpulan informasi yang tergesa-gesa dan pembuatan kebijakan yang darurat. Pemerintah pendudukan Jepang memasuki Jawa dengan tidak banyak mempunyai informasi dan perencanaan matang. Malah, mereka belajar melalui *trial* dan *error*. Akan tetapi adalah hal yang dipastikan bahwa mereka ingin sekali memperoleh informasi dari tangan pertama sebanyak mungkin. Laporan survey yang dicetak kembali ini adalah indikasi yang bagus mengenai tingkat usaha dan pengetahuan yang dimiliki para 'ahli' dari Jepang mengenai situasi Islam pada tahap awal pendudukan Jepang.

Bagaimana isi laporan tersebut? Laporan terdiri dari 16 bab dengan 391 halaman. Setelah Bab Satu pendahuluan yang bersifat ringkas, Bab Dua dan Tiga menggambarkan sejarah penyebaran Islam ke Kepulauan Indonesia dan cara kehidupan keagamaan penduduknya. Bab Empat tentang mistisisme yang berdasarkan pada survey mengenai tarekat-tarekat (organisasi kaum sufi), aliran-aliran kebatinan, dan aliran lainnya dari Agustus 1942. Nama organisasi, nama pimpinan mereka, lokasi mereka, ajaran dan aktivitas mereka diulas oleh survey tersebut dan dilaporkan sebagian dengan huruf latin. Laporan ini bernilai sangat penting sebagai data sejarah. Akan tetapi, sayangnya, jumlah kasus yang diulas tampaknya terlalu kecil untuk dipertimbangkan mengenai situasi riil pada saat itu. Bab Lima menggambarkan rukun Islam dan prakteknya yang ada di kalangan Muslim Jawa. Bab Enam berisi 15 organisasi Islam, dari Muhammadiyah, Nahdatul Ulama sampai Ahmadiyah dan MIAI, dengan komentar-komentar oleh penyusun laporan yang mencerminkan evaluasi terhadap organisasi-organisasi ini. Bab Tujuh menggambarkan kebiasaan penduduk. Bab Delapan berisi laporan lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah Islam. Bab Sembilan membahas zakat dan wakaf. Bab

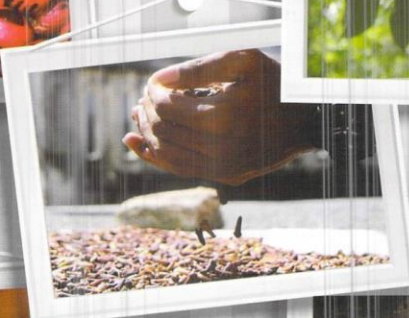
Sepuluh menggambarkan secara singkat hubungan penduduk Jawa dengan negara-negara muslim lainnya di dunia dan Bab Sebelas tentang hubungan antara Muslim Jawa dan kelompok etnis muslim lainnya, yaitu Muslim Arab dan Muslim India. Bab Tiga Belas dan Empat Belas berisi pernyataan-pernyataan kebijakan secara singkat tentang tren orang Jawa dalam pandangan Islam dan kedudukan Islam dari sudut operasi militer. Bab Lima Belas berisi berbagai informasi tentang kegiatan-kegiatan Kantor Urusan Pribumi pada zaman Belanda termasuk transkripsi wawancara dengan Dr. Pijper, mantan kepalaanya. Laporan diakhiri dengan catatan tambahan oleh editor.

Bab Delapan jauh lebih penting dalam buku ini karena berjumlah 207 halaman yang mengisi lebih dari setengah isi buku ini. Bagian Bab Delapan yang pertama melaporkan hasil survey kuantitatif mengenai (1) haji, (2) pengikut tarekat, (3) masjid, (4) mereka yang tinggal di Mekkah selama lebih dari dua tahun, (5) mereka yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, (6) mereka yang telah menyelesaikan belajarnya di Al-Azhar, (7) mereka yang belajar di selain negara Mesir, (8) sekolah agama, (9) guru agama, dan (10) Kiyai dan ulama. Bagian kedua Bab Delapan adalah laporan deskriptif tentang Pondok Pesantren atau sekolah agama Islam lainnya di Jawa berdasarkan survey mengenai nama, alamat, jumlah santri, dan nama kiyai. Ciri khas utama yang menonjol dari bab ini adalah seluruh isinya dicetak dalam huruf latin.

Bagaimanapun, survey tersebut adalah bagian bukti primer untuk menggambarkan persepsi dan pengetahuan para "ahli" Islam berkebangsaan Jepang di Jawa pada masa awal pendudukan Jepang. Survey ini mengizinkan kita untuk membandingkan tren jangka panjang tentang "situasi Islam" (yaitu jumlah haji, masjid, pesantren, guru agama, kiyai dan sebagainya) di kecamatan tertentu atau di Jawa sebagai keseluruhan saat itu dan sebelumnya atau kemudian. Informasi deskriptif pada bagian kedua dari Bab Lima juga akan sangat berharga untuk sejarah sosial keagamaan dalam lokalitas tertentu. Singkatnya, laporan survey ini dalam bentuk cetak kembali akan menambah bahan riset yang berguna untuk mengkaji sejarah Indonesia modern. ●

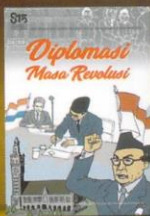
Bingkai



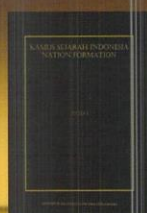
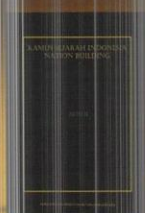
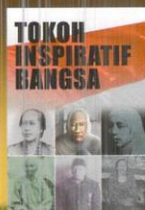
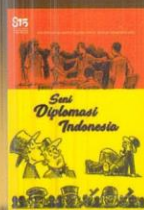
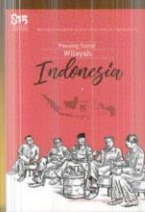
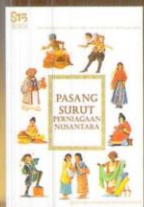


Pustaka

*Buku dan Komik Terbitan Subdit Sejarah
untuk SD, SMP dan SMA Tahun 2017*



*Buku dan Komik Terbitan Subdit Sejarah
untuk SD, SMP dan SMA Tahun 2017*



Hilmar Farid dan Direktorat Sejarah

“Semua orang yang *ngomong* tentang perubahan pasti punya bayangan itu (duduk dalam kekuasaan), kalau mereka serius ingin melakukan perubahan”,
(Hilmar Farid, 2016)

Ungkapan di atas pernah dikemukakan oleh sosok Hilmar Farid. Namanya sudah tidak asing dikalangan sejarawan akademisi dan aktivis. Ia menyelesaikan kuliah S1 di jurusan sejarah Universitas Indonesia tahun 1993 dan meraih gelar Doktor bidang kajian budaya di National University of Singapore pada Mei 2014. Pria kelahiran 8 Maret 1968 ini berprofesi sebagai dosen di Institut Kesenian Jakarta dari 1995-1999, dan kembali mengajar di kampus tersebut sejak 2014 sampai sekarang.

Setahun setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia bersama beberapa orang seniman, peneliti, aktivis dan pekerja budaya mendirikan Jaringan Kerja Budaya di Jakarta. Pada 2003, bersama sejumlah sejarawan aktivis, ia mendirikan Institut Sejarah Sosial Indonesia. Fokusnya pada gerakan sosial dan sejarah membawanya menjadi Ketua Perkumpulan Praxis (2012) dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (2016). Karir birokrasinya dimulai pada 31 Desember 2015, sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia adalah sosok yang dua tahun terakhir ini mendapat banyak sorotan karena menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan pertama yang tidak berasal dari kalangan birokrat. Salah satu hal yang

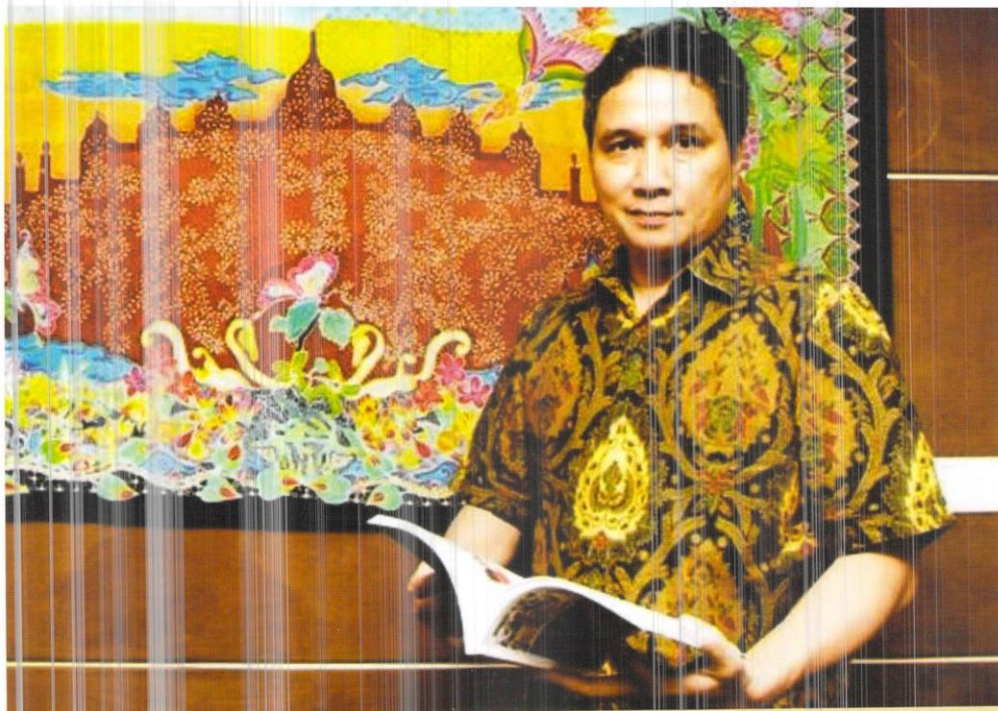
membanggakan dari kiprah kerjanya adalah disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Menggali pemikiran Dirjen Kebudayaan yang memiliki latar belakang sebagai sejarawan menjadi sebuah hal yang menarik untuk diketahui utamanya oleh pembaca Beranda. Demikian pula dengan posisi Direktorat Sejarah kaitannya dengan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena fungsi Direktorat Sejarah adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah.

Berikut adalah kutipan wawancara Beranda dengan sosok Hilmar Farid.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap Direktorat Jenderal Kebudayaan dan apa yang memotivasi Bapak masuk dalam lingkungan pemerintahan?

Pandangan saya dari dulu tidak berubah tentang Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat ini memiliki arti penting. Indonesia adalah negara besar yang memiliki kekayaan luar biasa, serta sejarah yang begitu panjang. Salah satu misi Negara ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dan



2 tentang Kebudayaan. Tidak banyak urusan negara dan pemerintahan tercantum di dalam konstitusi. Posisi kebudayaan yang masuk dalam konstitusi dianggap penting, sebab akan dikelola oleh negara.

Pada era Pak Jokowi dibentuk Koordinator Kementerian Pendidikan Manusia dan Kebudayaan, dan lagi lagi kebudayaan muncul. Saya melihat kebudayaan mendapatkan posisi dan porsi yang penting. Hal ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari konstitusi yang sekarang sedang di tingkatkan, tentunya bisa dilihat bahwa kantor ini memiliki arti yang sangat penting. Nah hal itu yang mendorong saya untuk terjun dalam pemerintahan. Untuk itu saya mengajukan diri menjadi Dirjen Kebudayaan.

Sebagai orang yang sudah sering terlibat di Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, bagaimana pandangan Bapak tentang Ditjenbud?

Saya mengikuti perkembangan dari masing-masing direktorat, berinteraksi di dalam Direktorat Sejarah, sempat juga di Direktorat Kesenian, dan semua hal iri bukan hal yang baru bagi saya. Awalnya posisi saya dari luar hanya bisa memberi komentar, setelah

masuk tidak hanya bisa komentar, namun saya harus bisa memberikan masukan solusi, memimpin, dan melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan ini. Yang membedakan setelah saya menjabat adalah peran, beban kerja, volume pekerjaan, waktu, tanggung jawab, serta misi, ini dia yang membedakan ketika saya masih di luar. Karena ketika sudah di dalam sebuah perkataan yang terucap, seperti sebuah keputusan dan tindakan adalah perintah. Untuk itu saya sangat menjaga komunikasi, memikirkan agar apa yang dikatakan benar-benar yang sudah di pikirkan matang-matang.

Mengenai problem yang terjadi di Direktorat Jenderal Kebudayaan, tidak melulu soal pemimpin akan tetapi juga terkait struktur organisasi dan kelembagaan juga terkait dengan anggaran jadi saya masuk dengan kesadaran itu. Fungsi pemimpin memastikan semua program berjalan dengan baik. Saya sangat berharap organisasi ini berjalan dengan baik, dengan segala macam masalahnya. Akan ada masalah ditemukan di setiap organisasi, kalau organisasi 100% benar pun juga tidak baik, itulah justru gunanya pimpinan agar tidak memperlambat kerja, namun jujur saya sendiri tidak punya keluhan yang signifikan, karena sudah mengenal jauh sebelum saya masuk sini.

Wajah

Salah satu hal yang dianggap sebagai prestasi adalah disahkannya Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. Mengapa Undang-undang Kemajuan Kebudayaan membutuhkan waktu yang lama untuk disahkan?

Membahas mengenai undang-undang tentang kebudayaan saya rasa selama ini pembahasannya masih sangat abstrak. Proses kebudayaan dan proses kultural, berlangsung ditingkat yang sangat konkrit, bagaimana kita memberi nilai dan menjamin itu sampai? Kan tidak bisa kita memberi orang nilai dan orang itu harus berperilaku sesuai yang direncanakan. Yang mesti kita urus adalah transmisi nilai. Ini namanya tata kelola, manajemen dari transmisi nilai bukan nilainya itu sendiri. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kembali ke konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 negara memajukan memajukan budaya nasional. Jadi perintah konstitusi jelas berarti harus dibawa gerak maju. Pertanyaan selanjutnya mau memajukan ke arah mana? Lihat pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, sudah jelas melindungi segenap tumpah darah dan tanah air dan mencerdaskan kehidupan bangsa dari segi itu pun sudah jelas. Bagian yang terpenting sekarang, bagaimana memajukan bangsa itu. Kalangan akademik bisa membantu kita memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip etik. Prinsip etik dasarnya keputusan politik. Konstitusi kan keputusan politik. Ini keputusan dasar yang dipegang agar dapat menyumbang dengan optimal. Karena waktu akan habis dan terbuang apabila perdebatan kebudayaan hanya berkutat dengan pengertian-pengertian.

Apa yang Bapak harapkan dari Direktorat Sejarah sehingga memiliki peran yang strategis di dalam pembangunan?

Menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki dari Direktorat Sejarah dari segi program. Dirjen Kebudayaan dan juga termasuk Direktorat Sejarah misinya harus memastikan munculnya tata kelola



yang baik agar orang bisa menghasilkan pengetahuan sejarah, dan agar masyarakat kesadaran sejarahnya tumbuh. Jadi fungsinya bukan memproduksi buku. Kalau kita perhatikan secara umum, kesadaran seseorang terhadap sejarah juga sudah mulai meningkat, problem kita adalah bagaimana mencapai jiwa nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana caranya kita mendorong orang untuk menghasilkan karya-karya yang bukti empiriknya jauh lebih solid dan itu perlu benar-benar kita analisis.

Kita lihat problem besarnya. Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, dan sumber-sumber utama sejarah adanya di Jakarta. Misalnya saya ada di Sorong, Papua berarti jika saya ingin mengetahui dan mempelajari sumber-sumber sejarah yang ada saya harus ke Jakarta. Problematikannya berarti dari jarak. Nah tujuan kita dari Direktorat Sejarah perlu memfasilitasi cara bagaimana memperluas akses itu, dengan menggunakan internet, semua orang bisa akses, di copy dan diperbanyak. Direktorat Sejarah juga harus meningkatkan kapasitas untuk itu, sekarang ada sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kualitas sejarawan. Tugas utama Direktorat Sejarah adalah meregulasi ekosistem dari produksi pengetahuan sejarah. Jika dalam rangkaian itu Direktorat Sejarah ingin terlibat penerbitan buku, diperbolehkan saja tidak masalah, namun perlu diketahui kita bukan lembaga penelitian dan bukan penerbit, bukan seperti LIPI atau Perguruan Tinggi. Fokus kita adalah pengetahuan sejarah dan kesadaran sejarah masyarakat. Jadi pagar utamanya Direktorat Sejarah adalah direktorat-direktorat yang mengurus pendidikan dasar dan tingkat menengah, diluar itu ada komunitas dan sebagainya. Direktorat Sejarah juga perlu merumuskan kebijakan terkait kemunitas kesejarahan. Selain itu, Direktorat Sejarah juga perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan permasalahan guru dan pelajaran sejarah di sekolah sehingga satuan pendidikan ini bisa jauh lebih tanggap karena guru adalah pelaku utama dilapangan yang menanamkan pengetahuan dan kesadaran sejarah.

Bapak mengatakan sejarah memiliki peran yang lebih besar dan sekarang banyak orang yang lebih sadar akan sejarahnya. Melihat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada sesuatu yang menggelitik bahwa tidak ada kata sejarah dalam undang-undang tersebut. Mengapa demikian? Apakah ada makna khusus?

Sederhana saja karena sejarah bukan objek tapi lingkup. Sejarah bukan objek khusus yang bisa disandingkan misalnya dengan tradisi lisan, benda cagar budaya dan, sastra. Objek-objek tersebut pasti memiliki konten sejarah di dalamnya karena sejarah adalah lingkungannya dari berbagai macam objek pemajuan kebudayaan yang lebih konkrit, jadi kalau tidak dicantumkan sebagai objek, bukan karena kita tidak memperhatikan sejarah, tapi karena ini beda taksonomi, istilah sekarang itu tidak "apple to apple" antara sejarah dengan objek yang lain, jadi sejarah sebagai lingkup itu lebih tinggi dibandingkan objek lain. Jika dilihat dari 10 objek Pemajuan Kebudayaan dan lampirannya hampir semua kontennya berisi tentang sejarah, jadi bukannya tidak ada justru semua lebih mengarah tentang sejarah. Undang-undang tersebut justru menunjukkan sejarah

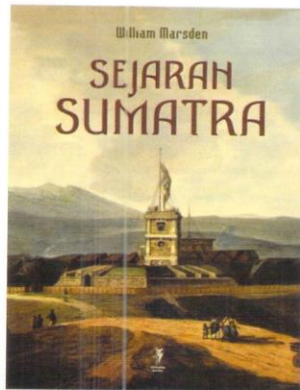
memiliki posisi strategis dalam pemajuan kebudayaan. Misalnya Tradisi lisan. Direktorat Sejarah seharusnya memperbanyak sumber-sumber lisan. Kenapa? untuk mengimbangi dokumen-dokumen yang selama ini banyaknya berasal dari kekuasaan kolonial. Salah satu tugas Direktorat Sejarah bekerjasama dengan ANRI dan Perpustakaan Nasional adalah mewawancarai semua orang yang sudah berusia lanjut dan penting bagi sejarah Indonesia. Tugas kita juga untuk melobi mereka yang menyimpan sumber sejarah untuk menyerahkan koleksinya ke ANRI dan Perpustakaan Nasional agar bisa diakses secara luas. Selain itu fungsi strategis lain adalah mengimbangi isu-isu kesejarahan yang berkembang di masyarakat dengan memberikan fasilitasi penelitian kepada para akademisi sejarah. Jadi sangat penting adanya kesadaran sejarah dalam upaya memajukan kebudayaan.

Tugas besar dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah mengidentifikasi kekayaan budaya dan sejarah yang kita miliki. Di India usaha yang sama sedang dilakukan, dengan cara pengumpulan bukti-bukti sejarah. Setelah diinventarisasi maka kekayaan tersebut bisa dilindungi, setelah itu bisa dikembangkan. Jadi tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan terutama Direktorat Sejarah bertugas memastikan ekosistem ini berjalan. ●



Dirjen Kebudayaan didampingi Kasubdit Geografi Sejarah sedang mengamati hasil foto peserta ekspedisi

Lada dalam Catatan William Marsden



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Judul Buku | : Sejarah Sumatra |
| Judul dalam Bahasa Inggris | : The History of Sumatra |
| Penulis | : William Marsden |
| Penerjemah | : Tim Komunitas Bambu |
| Penebit | : Komunitas Bambu, Depok |
| Tahun Terbit | : 2013 |
| Tebal Halaman | : 598 Halaman |
| Besar Buku | : 15,5 cm x 24 cm |
| Jenis Cover | : Soft Cover |
| ISBN | : 978-602-9402-3 |

Sejarah *Sumatra* (Judul asli: *The History of Sumatra*) adalah karya monumental yang dilahirkan oleh sejarawan Inggris terkenal berdarah Irlandia, William Marsden (1754 – 1836). Thomas Stamford Raffles dalam sambutannya dalam HUT XXV The Society of Arts and Science di Batavia pada tahun 1813 mengatakan bahwa, “Marsden telah melemparkan cahaya ke atas pulau Sumatra dengan *The History of Sumatra*, sehingga semua tampak terang di pulau yang sangat penting itu”. Tidak sampai disitu, pujian terhadap karya ini juga datang dari John Crawfurd. Crawfurd mengatakan bahwa, “Marsden menggambarkan kesusastaan, sejarah, dan adat istiadat di Sumatra secara rinci, akurat, terampil dan orisinal. Karyanya akan punya kekuatan dan akan terus diperhitungkan dalam menjelaskan Sumatra”.

Sejak pertama kali terbit pada tahun 1783 sejumlah akademisi sangat mengapresiasi bagaimana Marsden mendeskripsikan Sumatra. Karya ini begitu memukau

dan dipuji sebagai karya sejarah-ensiklopedik unggulan terkait sejarah Sumatra.

Marsden menjadi sangat terkenal ketika edisi pertama buku *Sejarah Sumatra* ini terbit di London pada tahun 1783, kedua 1784 dan ketiga 1811. Walaupun sesudahnya banyak karya tentang sejarah Sumatra, sebut saja Anthony Reid yang juga gigih dalam menyajikan sejarah Sumatra, namun karya William Marsden ini tetap istimewa serta selalu dirujuk sebagai sebuah historiografi klasik yang monumental.

Riset Marsden dalam buku ini dimulai pada tahun 1771. Saat itu ia tinggal di Bengkulu dan usianya masih 17 tahun. Dalam penelitiannya Marsden menggunakan metode layaknya jurnalis yang pada masa klasik metode ini juga pernah digunakan oleh Tucydides saat menggambarkan perang Peloponnesos.

Marsden melakukan liputan pandangan mata layaknya seorang jurnalis. Bagian terbesar yang



dijabarkannya dalam buku ini adalah berdasarkan pengamatannya sendiri, sedangkan sisanya adalah pendapat umum dari orang-orang yang berpengaruh dan bekerja di East India Company (EIC).

Selain berdasarkan pengamatan dan pendapat umum, dalam risetnya, Marsden juga menggunakan sumber lisan. Saat berada di Rejang, Bengkulu, ia memperoleh berbagai sumber lisan terutama dari Pangeran Sunga Lemau, Linggang Alam yang saat itu mengawali pemerintahannya sebagai kepala suku Rejang.

Pengamatannya ditunjang dengan kepiawaiannya dalam menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kala itu menjadi semacam *Lingua Franca* bagi daerah-daerah di Nusantara. Bahasa Melayu inilah yang kemudian menjadi jembatan Marsden dalam memahami keseharian masyarakat Sumatra. Dengan bahasa Melayu ia dapat memahami etiket dan keseharian orang-orang Sumatra mulai dari Aceh sampai wilayah Lampung bagian Selatan.

"Buku Tua" karya Marsden layakannya sebuah "sejarah keseharian". Marsden membahas secara menyeluruh aspek kehidupan masyarakat Sumatra yang meliputi tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, bahasa, politik lokal, aksara dan dinamika masyarakat Sumatra. Lebih lanjut, buku yang lebih mendekati hasil reportase ini membahas mengenai ekologi, cuaca, sistem angin, sungai, pelabuhan di muara sungai, dataran, bukit, gunung, buah-buahan, tanaman obat an aneka bunga dan aneka



William Marsden (1754 – 1836)

Sumber: William Marsden. Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

fauna endemik Sumatra.

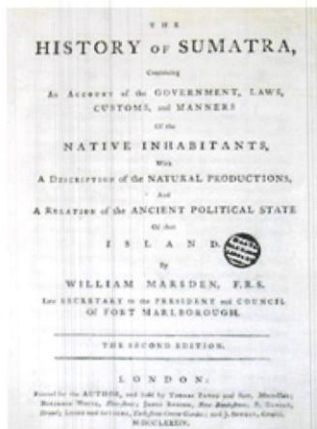
Sajian buku Marsden tidak berhenti sampai disitu, lebih lanjut Marsden membahas mengenai dinamika kehidupan masyarakat Sumatra, arsitektur dan pakaian orang Sumatra. Yang cukup menarik dalam pembahasan buku ini adalah ulasan Marsden mengenai tata-cara bercocok tanam, ekstensifikasi pertanian dan perkebunan penduduk. Tidak lupa diungkap pula kekayaan hutan, bahan mineral dan rempah yang sejak zaman purbakala menjadi komoditi

andalan, lada utamanya.

Bila Banda terkenal dengan penghasil Pala, Sumatra dalam catatan Marsden juga punya primadona, yakni Lada. Dalam ulasan buku Marsden ini dibahas secara mendalam mengenai lada yang menjadi komoditi unggulan Sumatra, khususnya di wilayah Sumatra bagian selatan. Marsden mengatakan,

"komoditas yang paling penting dari semua komoditas perdagangan di Sumatra adalah lada. Komoditas ini merupakan objek perdagangan utama yang dimonopoli langsung oleh East India Company (EIC)".

Dalam buku ini Marsden cukup dalam memberikan perhatian pada tanaman lada. Ia membahas secara menyeluruh berbagai aspek terkait pertanian lada di Sumatra yang meliputi; pembentukan jaringan perdagangan lada, harga, pembudidayaan lada, pembentukan kebun, tanaman penopang, deskripsi tanaman lada, metode pendorongan pertumbuhan, penempatan sulur, siklus produksi, metode pemangkasan, waktu panen, metode pengeringan dan pembersihan, lada



History of Sumatra. Pertama kali terbit di Londong pada 1783.

Sumber: <https://www.kcl.ac.uk/library/> (akses: 24 Juli 2017)

Khazanah

putih, survey terhadap perkebunan lada, pembaruan kebun, spesies lada, musim panen dan transportasi lada. Gambaran utuh mengenai budidaya lada oleh Marsden tidak terlepas keberadaan Marsden yang cukup lama di wilayah Sumatra bagian selatan. Sehingga ia memiliki banyak waktu untuk mengamati secara mendetail budidaya lada dan implikasinya terhadap masyarakat di wilayah itu.

Menurut Marsden, keberadaan lada di Sumatra mengundang orang-orang asing untuk bermukim di Sumatra. Banyak para tokoh politik lokal dari berbagai daerah di Sumatra yang sengaja mengundang pihak asing, untuk membentuk pemukiman di wilayah kekuasaan tokoh tersebut. Keberadaan orang-orang asing yang datang kemudian berangsur membentuk budaya industri di Sumatra. Hal ini yang kemudian memicu terciptanya pabrik untuk kelancaran perdagangan, sehingga membentuk jaringan perdagangan lada antara Sumatra dengan daerah lain.

Potensi lada yang menggiurkan membuat Inggris dengan cepat memonopoli lada di Sumatra. Untuk mengamankan produksi lada di Sumatra, bahkan, pihak Inggris membuat kontrak tertulis yang sangat formal dengan para kepala-kepala daerah. Dalam kontrak tersebut, rakyat Sumatra diminta untuk menanam lada sekaligus memberi hak pembelian eksklusif kepada Inggris. Sebagai gantinya, mereka akan dilindungi dari musuh atas dasar hak kedaulatan dan diberi sejumlah bayaran atau upeti atas hasil produksi dari wilayah masing-masing.

Marsden melihat, meskipun lada menjadi primadona di tanah Sumatra, namun secara sosial keberadaan lada tidak banyak menguntungkan masyarakat; para petani lada tidak merasakan kesejahteraan. Selama bertahun-tahun mereka menerima upah yang sangat rendah. Harga rendah tersebut membuat tiap penduduk lokal yang bekerja di perkebunan memperoleh pemasukan tidak lebih dari 8 hingga 12 dolar Spanyol pertahunnya.

Tidak hanya menggambarkan mengenai monopoli lada oleh pihak asing, Marsden juga menyentuh hal-hal teknis terkait budidaya lada. Hal inilah yang cukup unik dalam karya Marsden. Selain berusaha memberikan gambaran sejarah yang utuh, Marsden menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain seperti

botani. Bahkan Marsden mampu memberikan gambaran mengenai proses pembudidayaan lada secara mendetail. Menurut Marsden, dalam pembudidayaan lada, yang yang penting diperhatikan adalah menentukan lokasi perkebunan. Dataran rendah di tepi sungai biasa menjadi pilihan para pembudidaya lada untuk mengembangkan tanamannya. Dataran rendah dipilih karena kaya akan humus dan sumber air. Namun, menurut Marsden, para petani lokal acapkali mengabaikan perawatan tanaman lada yang baik dikarenakan kejengkelan para petani akan upah yang rendah. Para pekerja juga seakan bekerja malas-malasan karena pembagian keuntungan yang mereka dapatkan sangatlah kecil.

Untuk meminimalisasi kerja mereka, biasanya para petani menggunakan lahan bekas tanaman padi yang baru dibersihkan, hal ini atas pertimbangan humus alami yang terkandung di dalamnya. Sehingga para petani dapat mengurangi biaya penggunaan pupuk. Yang penting dalam pembudidayaan menurut Marsden adalah pembentukan kebun lada. Kebun lada dibentuk bujur sangkar. Dalam satu petak perkebunan umumnya ditanami 500 sampai 1000 pohon lada. Yang menarik lagi dalam hal ini adalah, setiap keluarga ditarget untuk menanam lada dalam jumlah tertentu. Para kepala keluarga dipatok dapat mencapai target 1.000 tanaman dengan bantuan keluarga mereka, sedangkan pria lajang dipatok target 500 tanaman.

Marsden memberikan penjabaran yang lebih mendetail mengenai tanaman penopang yang harus terlebih dahulu ditanamkan sebelum pembudidayaan lada dilakukan. Hal ini yang menjadi keunikan karya Marsden. Marsden begitu memahami secara mendetail teknik pembudidayaan lada tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat lokal. Untuk memahami proses pembudidayaan lada secara mendetail pastinya memerlukan pengamatan mendalam dan tidak sebentar.

Pengamatan Marsden terhadap lada begitu mengangumkan. Marsden mendeskripsikan tanaman





lada sebagai tanaman yang kuat serta dapat tumbuh dengan baik dari potongan-potongan ataupun lapisan-lapisan. Tanaman ini menempel ke tunas dari setiap penggabungan pada interval enam sampai 10 inci dan merambat di sekeliling penopang. Tanaman lada dapat tumbuh 20 hingga 25 kaki, tetapi paling subur saat lada ditanam di tanah dengan ketinggian 12 hingga 15 kaki.

Marsden juga memusatkan perhatiannya pada siklus produksi lada. Tanaman lada umumnya mulai berbuah pada tahun ketiga sejak penanaman. Namun kualitas produksinya belum akan maksimal selama satu atau dua musim, karena pengaruh prosedur yang baru saja dideskripsikan. Setelah itu kualitas lada perlahan akan mengalami peningkatan secara pasti selama tiga tahun kedepan sampai tanaman lada itu mencapai puncak produktifitasnya, yakni sekitar tahun ketujuh.

Setelah melewati masa puncak produktifitasnya perlahan tanaman lada akan mengalami penurunan produksi dan kualitas. Menurut pengamatan Marsden, dari beberapa kebun yang memiliki kualitas tanah sangat baik, buah dapat terus dipetik selama 20 tahun, namun kondisi demikian sangat jarang terjadi. Begitu muncul gejala penurunan kualitas, harus segera dilakukan pembaruan atau pembuatan kebun baru yang dapat mulai memberi hasil sebelum kebun yang lama berhenti berproduksi.

Lada dapat dipanen saat buah-buahannya mulai memerah. Jika sebagian dari lada tersebut belum memerah, walaupun belum matang, namun sudah mencapai pertumbuhan yang maksimal. Dalam satu tahun, biasanya para petani dapat memanen lada sebanyak dua kali. Yang pertama disebut *pupul agung* yakni antara bulan Oktober hingga Maret, sedangkan yang kedua dan yang lebih sedikit disebut *buah sela*, yakni antara April hingga September.

Setelah lada dipanen, tahap selanjutnya dalam pengamatan Marsden adalah pengeringan dan pembersihan. Hasil panen dikumpulkan dalam keranjang-keranjang kecil yang dipanggul di bahu. Kaum wanita dan anak-anak biasanya membantu dalam menghamparkan lada untuk dikeringkan di tanah yang rata, bersih dan keras. Hasil panen tersebut lalu dibiarkan terjemur di bawah sinar matahari.

Setelah dijemur lada akan mulai menghitam dan mengering. Selanjutnya bulir-bulirnya digosok sehingga

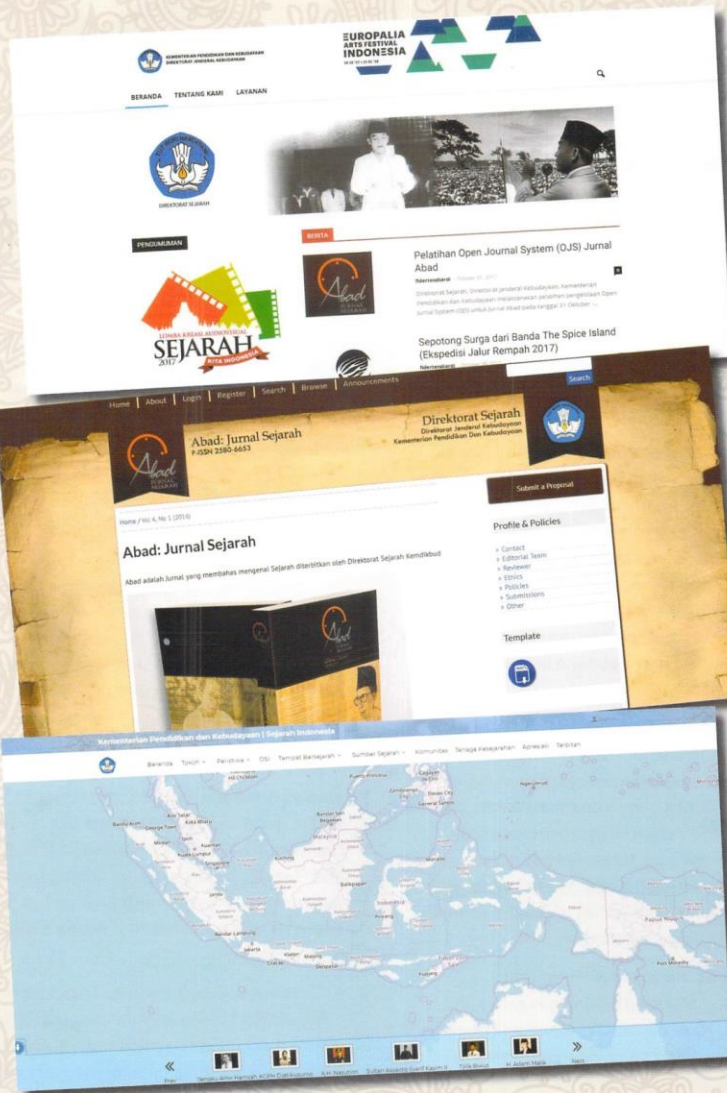


buah dan tangkainya terpisah. Selanjutnya bulir disaring dengan saringan besar bernama *nyiru*. Selanjutnya lada yang telah mengering disimpan di bawah rumah untuk kemudian diantarakan menggunakan rakit ke pabrik-pabrik orang Eropa di Hulu Sungai. Setelah lada sampai di tempat tujuan, kemudian lada disimpan digudang penyimpanan atau kapal-kapal dari Eropa yang telah menunggu. Sekitar sepertiga bagian dari lada hitam dikirim ke Cina.

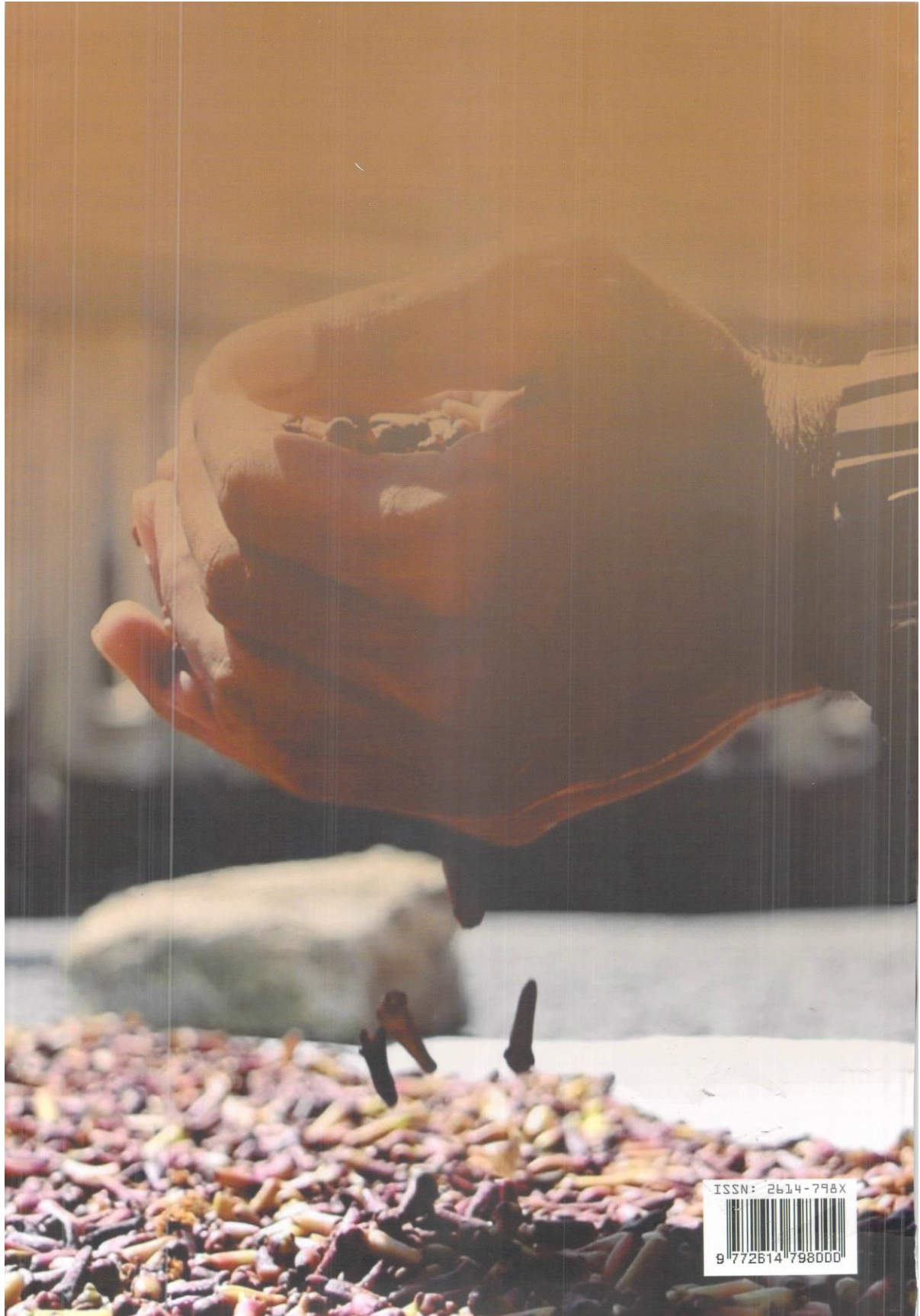
Gambaran mengenai tanaman lada adalah sebagian kecil dari deskripsi “sejarah keseharian” yang disajikan oleh William Marsden. Risetnya terkait deskripsi Sumatra begitu mengagumkan. Marsden cukup dapat mengedepankan profesionalitasnya sebagai sejarawan dengan menegdepankan objektivitas. Marsden berusaha membuktikan serangkaian fakta otentik yang beraturan dan menjelaskan segala sesuatu sesuai kenyataan daripada menunjukkan keratifitas dalam berimajinasi. Tidak aneh jika kemudian buku ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas dan para ahli. Yang unik dari karya ini adalah kepiawaian Marsden dalam memanfaatkan disiplin ilmu lain seperti geografi, linguistik, botani dan zoology yang melampaui batas keaslian sejarah.

Selain pujian, kritik juga datang John Bastin yang mengatakan bahwa konsep yang digunakan Marsden dalam buku ini ketinggalan zaman. Namun kemudian Bastin balik memuji, “sepanjang perhatian utamanya adalah untuk menjelaskan Sumatra dan masyarakatnya dan bukan masyarakat Eropa di pulau tersebut, pandangan buku Marsden tetap modern”. Oleh karena itu, buku ini layak dijadikan rujukan bagi siapa saja yang berminat mengkaji sejarah Sumatra dan dinamika masyarakatnya. ●

Kunjungi Website Kami



<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>
<https://jurnalabad.kemdikbud.go.id/>
<https://sejarah.dapobud.kemdikbud.go.id/>



ISSN: 2614-798X



9 772614 798000